



LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

(D P M P T S P)

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini kami sampaikan Laporan Keuangan Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Ray.

Laporan Keuangan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah yang disempurnakan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan SKPD ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian Laporan Keuangan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya, kami sampaikan. Semoga Laporan Keuangan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya bermanfaat bagi kita semua.

Sungai Raya, April 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kubu Raya,



AZMI, S.E., M.E.
Pembina Tingkat I
NIP. 197007202000031006

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2025 (LRA)

NERACA PER 31 DESEMBER 2025

LAPORAN OPERASIONAL (LO) PER 31 DESEMBER 2025

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) PER 31 DESEMBER 2025

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

Bab I	Pendahuluan	1
1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3	Sistematika penyajian Catatan atas Laporan Keuangan.....	6
Bab II	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	7
2.1.	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD.....	7
2.2.	Hambatan dan Kendala	20
Bab III	Kebijakan Akuntansi	21
3.1.	Entitas Akuntansi (Satuan Kerja Perangkat Daerah).....	21
3.2.	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	21
3.3.	Basis pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	21
Bab IV	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.....	23
4.1.	Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	23
4.2.	Penjelasan Pos-Pos Neraca	27
4.3.	Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO).....	36
4.4.	Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	44
Bab V	Penjelasan atas Informasi non Keuangan	46
5.1.	Informasi Tambahan	46
5.2.	Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah	47
Bab VI	Penutup.....	51

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	7
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025	8
Tabel 2.3 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025	11

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) tahun anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Sungai Raya, April 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kubu Raya,



AZMI, S.E., M.E.

Pembina Tingkat I

NIP. 197007202000031006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), bahwa implementasi SAP dimulai pada tahun 2015. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan audited atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas akuntansi pada pemerintah daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah tersebut SKPD dalam hal ini Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang (PB) wajib menyusun laporan keuangan SKPD yang menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilaksanakan selama satu periode pelaporan.

Maksud disusunnya laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kegiatan entitas akuntansi dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan disusunnya laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai;
- b) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;

- c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas akuntansi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas akuntansi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan SKPD menyediakan informasi mengenai sumber daya dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban dan ekuitas suatu entitas akuntansi.

Adapun komponen laporan keuangan yang wajib disajikan adalah :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Operasional (LO);
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
4. Neraca;
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025;
27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025;
28. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 46 tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025;
29. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 60 tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025;
30. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
31. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
32. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap;
33. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
34. Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan SKPD
- 3.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 3.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- 4.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 4.2. Neraca
- 4.3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 4.4. Laporan Operasional (LO)

BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Secara keseluruhan, realisasi anggaran mencapai 98,19% dari total pagu sebesar Rp. 7,08 miliar, yang menunjukkan kinerja penyerapan anggaran sangat baik dan efektif, dan dibuktikan dengan diraihnya penghargaan Perangkat Daerah dengan Realisasi Anggaran Tertinggi ke 1 Kategori Anggaran di Bawah 10 Milyar Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati Kubu Raya. Tingginya tingkat realisasi ini mencerminkan perencanaan yang matang serta pelaksanaan kegiatan yang relatif optimal di hampir seluruh program. Rincian anggaran dan realisasi anggaran tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH (KURANG)
		(RP.)	%	
BELANJA DAERAH	7.084.756.934,00	6.956.328.207,00	98,18	128.428.727,00
BELANJA OPERASI	6.852.933.556,00	6.733.375.707,00	98,25	119.557.849,00
Belanja Pegawai	4.837.647.233,00	4.748.095.670,00	98,14	89.551.563,00
Belanja Barang dan Jasa	2.015.286.323,00	1.985.280.037,00	98,51	30.006.286,00
BELANJA MODAL	231.823.378,00	222.952.500,00	96,17	8.870.878,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	231.823.378,00	222.952.500,00	96,17	8.870.878,00

Berdasarkan data realisasi belanja daerah tersebut, dapat disusun analisis sebagai berikut:

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan mencapai Rp. 6.956.328.207,00 atau sebesar 98,18% dari total anggaran sebesar Rp. 7.084.756.934,00, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 128.428.727,00. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran secara umum telah berjalan sangat baik dan efektif sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Pada kelompok Belanja Operasi, realisasi mencapai Rp. 6.733.375.707,00 atau sebesar 98,25% dari anggaran Rp. 6.852.933.556,00, dengan sisa

anggaran Rp. 119.557.849,00. Tingginya capaian realisasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan operasional perangkat daerah telah berjalan optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 4.748.095.670,00 atau 98,14% dari anggaran Rp. 4.837.647.233,00, dengan sisa anggaran Rp. 89.551.563,00. Sisa anggaran tersebut umumnya disebabkan penyesuaian kebutuhan belanja pegawai selama tahun berjalan.

Sementara itu, Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 1.985.280.037,00 atau mencapai 98,51% dari anggaran Rp. 2.015.286.323,00, dengan sisa anggaran Rp. 30.006.286,00. Tingginya realisasi pada komponen ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pendukung pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik. Efisiensi belanja dan optimalisasi penggunaan sumber daya menjadi faktor yang mempengaruhi adanya sisa anggaran.

Pada kelompok Belanja Modal, realisasi mencapai Rp. 222.952.500,00 atau sebesar 96,17% dari anggaran Rp. 231.823.378,00, dengan sisa anggaran Rp. 8.870.878,00. Realisasi tersebut berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang juga mencapai 96,17%. Sisa anggaran terjadi karena adanya efisiensi hasil pengadaan barang serta penyesuaian kebutuhan riil di lapangan.

Secara keseluruhan, tingkat realisasi anggaran yang tinggi mencerminkan kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu, sisa anggaran yang relatif kecil menunjukkan adanya pengendalian anggaran yang baik tanpa mengurangi capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran sudah efektif, efisien, dan terkendali, dengan mayoritas program berada di atas 95%. Ke depan, perlu dilakukan optimalisasi pada kegiatan dengan realisasi di bawah 95% melalui peningkatan perencanaan teknis, penjadwalan kegiatan, serta penguatan monitoring dan evaluasi agar penyerapan anggaran dapat lebih maksimal.

Jumlah anggaran dan realisasi anggaran menurut program, kegiatan dan subkegiatan pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan, dan
Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	
		(Rp.)	(%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.587.374.513,00	5.343.132.349,00	95,63
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.571.992,00	13.299.128,00	97,99
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.522.680,00	4.522.680,00	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	540.832,00	517.616,00	95,71
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	540.832,00	517.616,00	95,71
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	540.832,00	517.616,00	95,71
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	540.832,00	517.616,00	95,71
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.533.408,00	6.353.408,00	97,24
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	352.576,00	352.576,00	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.293.029.569,00	4.082.557.990,00	95,10
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.264.236.979,00	4.054.355.446,00	95,08
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.090.046,00	23.500.000,00	97,55
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.264.400,00	4.264.400,00	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	438.144,00	438.144,00	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.264.512,00	45.514.512,00	98,38
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	36.000.000,00	35.250.000,00	97,92
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.710.528,00	3.710.528,00	100
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6.553.984,00	6.553.984,00	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.266.717,00	222.588.070,00	98,81
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.003.105,00	2.637.500,00	87,83
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	137.601.232,00	135.630.029,00	98,57
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.933.380,00	11.830.376,00	99,14
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.160.000,00	2.160.000,00	100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.650.600,00	38.429.377,00	99,43
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	31.918.400,00	31.900.788,00	99,94
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78.850.000,00	78.850.000,00	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.850.000,00	78.850.000,00	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	838.158.664,00	811.476.469,00	96,82
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	564.041.509,00	539.760.569,00	95,70
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	274.117.155,00	271.715.900,00	99,12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.233.059,00	88.846.180,00	96,33
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.195.184,00	30.327.200,00	94,20
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.658.843,00	25.693.980,00	96,38
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.530.000,00	18.306.000,00	98,79
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.849.032,00	14.519.000,00	97,78
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	40.659.288,00	40.377.036,00	99,31
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	17.034.688,00	16.909.656,00	99,27
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4.624.160,00	4.624.128,00	100
Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	12.410.528,00	12.285.528,00	98,99
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	23.624.600,00	23.467.380,00	99,33
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	23.624.600,00	23.467.380,00	99,33
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	6.890.792,00	6.890.692,00	100
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6.890.792,00	6.890.692,00	100

Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	6.890.792,00	6.890.692,00	100
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	496.501.058,00	495.837.380,00	99,87
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	496.501.058,00	495.837.380,00	99,87
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	453.453.036,00	453.371.600,00	99,98
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	37.624.032,00	37.493.280,00	99,65
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	5.423.990,00	4.972.500,00	91,68
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	390.230.000,00	386.725.860,00	99,10
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	390.230.000,00	386.725.860,00	99,10
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	38.953.400,00	38.676.400,00	99,29
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	238.678.392,00	235.648.848,00	98,73
Pengawasan Penanaman Modal	112.598.208,00	112.400.612,00	99,82
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	56.171.301,00	55.588.824,00	98,96
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56.171.301,00	55.588.824,00	98,96
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	56.171.301,00	55.588.824,00	98,96
Jumlah	6.577.826.952,00	6.328.552.141,00	96,21

Hasil pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya pada Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100,00%
2.18.01 2.01	KABUPATEN/KOTA					
2.18.01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00%
2.18.01 2.01 0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100,00%
2.18.01 2.01 0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00%
2.18.01 2.01 0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00%
2.18.01 2.01 0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00%
2.18.01 2.01 0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00%
2.18.01 2.01 0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	6	100,00%

DPMTSP KKR

2.18.01 2.01 0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	100,00%
2.18.01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00%
2.18.01 2.02 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	26	26	100,00%
2.18.01 2.02 0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100,00%
2.18.01 2.02 0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100,00%
2.18.01 2.02 0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	1	100,00%
2.18.01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00%
2.18.01 2.05 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	100,00%
2.18.01 2.05 0005	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	100,00%
2.18.01 2.05 0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	81	81,00%
2.18.01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00%
2.18.01 2.06 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%

DPMTSP KKR

2.18.01 2.06 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	36	100,00%
2.18.01 2.06 0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100,00%
2.18.01 2.06 0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	720	720	100,00%
2.18.01 2.06 0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	30	100,00%
2.18.01 2.06 0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	100,00%
2.18.01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	0	0	0
2.18.01 2.07 0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0
2.18.01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	60	60	100,00%
2.18.01 2.08 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	48	100,00%
2.18.01 2.08 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00%
2.18.01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	60	60	100,00%

2.18.01 2.09 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100,00%
2.18.01 2.09 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	9	100,00%
2.18.01 2.09 0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	22	22	100,00%
2.18.01 2.09 0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	11	11	100,00%
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Penanaman Modal (Investor PMDN dan PMA)	Persen	15%	61,16%	407,73
2.18.02 2.01	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan Dokumen penetapan pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan berusaha di daerah	Dokumen	1	1	100,00%
2.18.02 2.01 0001	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	1	100,00%
2.18.02 2.01 0004	Sub Kegiatan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Dokumen	2	2	100,00%

2.18.02.2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Peta Potensi Investasi	Dokumen	1	1	100,00%
2.18.02.2.02.0004	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100,00%
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Calon Investor yang Beraudensi Ke PEMDA	Investor	1	1	100,00%
2.18.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kali dengan strategi	1	1	100,00%
2.18.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen	1	1	100,00%
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	Persen	87%	97,19%	111,71%
2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal	Perizinan dan Non Perizinan	7.315	11.099	151,72%
2.18.04.2.01.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	6400	6,4	100,00%
2.18.04.2.01.0007	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	850	454	53,41%

2.18.04 2.01 0008	Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	60	60	100,00%
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi PMDN and PMA	Rupiah	17.355.990.095.316,4	1.864.202.689.758,7	106,3
		Jumlah Investor PMDN dan PMA	Investor	423 (400 PMDN dan 23 PMA)	549 (505 PMDN dan 44 PMA)	129,78 (126,25 dan 191,30)
2.18.05 2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan PeRp. royek yang Dipantau, Dibina dan Diawasi	Pelaku Usaha	50	87	174
2.18.05 2.01 0004	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	14	14	100,00%
2.18.05 2.01 0005	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	360	360	100,00%
2.18.05 2.01 0006	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	25	25	100,00%

DPMPTSP KKR

2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Jenis Data dan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Digital/ Elektronik)	Dokumen	1	1	100,00%
2.18.06 2.01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Dokumen	1	1	100,00%
2.18.06 2.01 0002	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	1	1	100,00%

2.2. Hambatan Dan Kendala

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat sisa anggaran pada Belanja Barang dan Jasa dan serta Belanja Modal yang disebabkan adanya perbedaan anggaran (sesuai Standar Satuan Harga) kebutuhan riil (harga pasar);
2. Dalam pelaksanaan tahun anggaran berjalan, terdapat beberapa penyesuaian prioritas kegiatan yang mempengaruhi serapan anggaran sehingga sebagian anggaran tidak dapat direalisasikan secara maksimal.;

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Melakukan survei harga pasar barang-barang sebelum mengganggu belanja barang dan modal serta mengajukan SSH barang-barang tersebut;
2. Memperkuat koordinasi dan komunikasi antar pejabat pelaksana teknis kegiatan, pengelola keuangan, dan pihak terkait lainnya guna mengantisipasi hambatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD

Kebijakan akuntansi yang terkait dengan entitas akuntansi meliputi beberapa asumsi yang mendasarinya. Asumsi-asumsi tersebut adalah :

a. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti entitas akuntansi di anggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan yang diberikan kepada entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

b. Asumsi Kesenambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

c. Asumsi Keterukuran Dalam Satuan Uang (Monetary Measurement)

Laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Satuan uang yang digunakan adalah rupiah.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berP. engaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Kode	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Belanja Daerah	6.577.826.952,00	6.328.552.141,00
1.1	Belanja Operasi	6.498.976.952,00	6.249.702.141,00

Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kinerja yang cukup optimal. Hal ini dapat dilihat dari tingkat penyerapan anggaran yang tinggi pada komponen Belanja Daerah maupun Belanja Operasi.

Total Anggaran Belanja Daerah yang ditetapkan sebesar Rp. 6.577.826.952,00, dengan realisasi mencapai Rp. 6.328.552.141,00 atau sebesar 96,21%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Meskipun demikian, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 249.274.811,00 yang tidak terealisasi hingga akhir tahun anggaran.

Selanjutnya, pada komponen Belanja Operasi yang merupakan bagian terbesar dari Belanja Daerah, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.498.976.952,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.249.702.141,00 atau mencapai 96,16%. Tingginya realisasi Belanja Operasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan rutin perkantoran, pelayanan perizinan, serta dukungan operasional lainnya telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan.

Tidak terealisasinya sebagian anggaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya efisiensi belanja, penghematan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Selain itu, penyesuaian terhadap kebutuhan riil di lapangan juga turut mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran.

Secara keseluruhan, kinerja pengelolaan keuangan pada DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 dapat dikategorikan baik, yang ditunjukkan dengan tingkat realisasi anggaran di atas 95%. Hal ini mencerminkan adanya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta

komitmen perangkat daerah dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

4.3.1. Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Belanja Pegawai	4.837.647.233,00	4.748.095.670,00

Jumlah anggaran dan realisasi tersebut terdiri dari :

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1.308.372.632,00	1.297.073.240,00
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	222.480.549,00	218.919.599,00
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	128.134.612,00	126.987.054,00
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	15.709.316,00	15.506.254,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	93.635.625,00	90.090.000,00
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	97.697.665,00	95.972.040,00
7	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	21.062.917,00	9.900.000,00
8	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	19.795.000,00	19.610.000,00
9	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	8.996.458,00	8.834.583,00
10	Belanja Tunjangan Beras PNS	67.739.857,00	67.133.340,00
11	Belanja Tunjangan Beras PPPK	11.867.827,00	11.695.830,00
12	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	221.326.890,00	198.817.367,00
13	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.387,00	14.961,00
14	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6.220,00	5.530,00
15	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	121.655.988,00	118.596.788,00
16	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	22.486.381,00	20.862.180,00
17	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.732.068,00	2.673.136,00
18	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	506.084,00	497.538,00
19	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.100.737,00	8.019.382,00
20	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.518.198,00	1.492.560,00

21	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	712.390.815,00	708.330.708,00
22	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	106.505.601,00	102.782.771,00
23	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	377.826.499,00	375.706.405,00
24	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	46.469.626,00	38.860.846,00
25	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.061.551.652,0 0	1.055.461.501,00
26	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	157.062.629,00	154.252.057,00

4.3.2. Belanja Barang dan Jasa

	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Belanja Barang dan Jasa	2.015.286.323,00	1.985.280.037,00

Jumlah anggaran dan realisasi tersebut terdiri dari :

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	28.510.530,00	25.220.000,00
2	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	701.800,00	0,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31.343.736,00	30.689.421,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	48.007.400,00	47.878.000,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	130.560.569,00	126.658.254,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.571.776,00	1.480.000,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	20.470.666,00	20.206.545,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.448.724,00	6.061.720,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	10.635.563,00	10.027.017,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	180.001.573,00	179.606.318,00
11	Belanja Natura dan Pakan-Natura	22.930.530,00	22.759.175,00
12	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	160.410.000,00	159.840.000,00

13	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.350.000,00	10.000.000,00
14	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	460.000.000,00	460.000.000,00
15	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11.900.000,00	11.900.000,00
16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	124.200.000,00	124.200.000,00
17	Belanja Tagihan Telepon	4.500.000,00	4.356.900,00
18	Belanja Tagihan Air	12.271.500,00	9.140.500,00
19	Belanja Tagihan Listrik	55.500.000,00	54.066.753,00
20	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	308.323.248,00	308.323.248,00
21	Belanja Lembur	46.995.000,00	46.895.000,00
22	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	22.200.000,00	22.200.000,00
23	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	24.162.000,00	21.990.212,00
24	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.566.200,00	1.080.000,00
25	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.963.600,00	1.350.000,00
26	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	1.812.310,00	1.812.000,00
27	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	80.020.000,00	79.915.654,00
28	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.702.999,00	4.565.200,00
29	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	21.900.000,00	21.785.000,00
30	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	20.740.000,00	20.318.000,00
31	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.350.000,00	10.270.000,00
32	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	110.450.599,00	110.249.394,00
33	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.786.000,00	30.435.726,00

4.3.3. Belanja Modal

Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Belanja Modal	231.823.378,00	222.952.500,00

Jumlah anggaran dan realisasi tersebut terdiri dari :

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	10.382.536,00	9.360.000,00
2	Belanja Modal Alat Pendingin	44.990.467,00	44.000.000,00
3	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	44.620.481,00	44.518.000,00
4	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	4.113.898,00	0,00
5	Belanja Modal Personal Computer	116.777.716,00	116.374.500,00
6	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	10.938.280,00	8.700.000,00

4.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)
1	ASET	17.630.693.904,00	824.465.151,00
1.1	ASET LANCAR	9.028.000,00	588.000,00
1.3	ASET TETAP	17.581.932.987,00	758.516.734,00
1.5	ASET LAINNYA	39.732.917,00	65.360.417,00

Berdasarkan Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya, posisi Aset pada Tahun 2025 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan Tahun 2024.

Total Aset pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp. 17.630.693.904,00, meningkat tajam dari Tahun 2024 sebesar Rp. 824.465.151,00. Kenaikan ini menunjukkan adanya penambahan nilai aset yang cukup besar, yang disebabkan oleh pengadaan barang milik daerah dan pencatatan aset yang sebelumnya belum di serah terima kan kepada DPMPTSP.

Pada komponen Aset Lancar, nilai aset pada Tahun 2025 sebesar Rp. 9.028.000,00, meningkat dari Tahun 2024 sebesar Rp. 588.000,00. Selanjutnya, Aset Tetap sebagai komponen terbesar menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, yaitu dari Rp. 758.516.734,00 pada Tahun 2024 menjadi Rp. 17.581.932.987,00 pada Tahun 2025. Kenaikan ini mengindikasikan adanya penambahan aset berupa peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan yang sebelumnya belum tercatat sebagai aset. Sementara itu, pada Aset Lainnya terjadi penurunan dari Rp. 65.360.417,00 pada Tahun 2024 menjadi Rp. 39.732.917,00 pada Tahun 2025.

Secara keseluruhan, peningkatan signifikan pada total aset menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan dan pencatatan Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya. Hal ini juga mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset.

Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan dalam penatausahaan aset, termasuk inventarisasi secara berkala, pemeliharaan aset, serta peningkatan kualitas pelaporan agar nilai aset yang disajikan semakin akurat dan dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

4.2.1 Aset Lancar

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.1	ASET LANCAR	9.028.000,00	588.000,00

Jumlah Aset Lancar Tahun 2025 dan Tahun 2024 masing-masing sebesar Rp. 9.028.000,00 dan Rp. 588.000,00 yang terdiri dari :

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.1	ASET LANCAR	9.028.000,00	588.000,00
1.1.12	Persediaan	9.028.000,00	588.000,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	9.028.000,00	588.000,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	9.028.000,00	588.000,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	9.028.000,00	588.000,00
	JUMLAH ASET LANCAR	9.028.000,00	588.000,00

Rincian persediaan dan berita acara pemeriksaan persediaan terlampir

Nilai Aset Lancar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada Tahun 2025. Total Aset Lancar per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp. 9.028.000,00, meningkat sebesar Rp. 8.440.000,00 dibandingkan Tahun 2024 yang hanya sebesar Rp. 588.000,00. Dengan demikian terjadi kenaikan sebesar 1.435,37 persen.

Peningkatan tersebut seluruhnya berasal dari akun Persediaan, khususnya pada kelompok Barang Pakai Habis berupa Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor yang terdiri dari Alat Tulis Kantor (ATK). Kenaikan nilai persediaan menunjukkan bahwa pada akhir Tahun 2025 masih terdapat

stok ATK yang tersedia dan belum digunakan dalam kegiatan operasional perangkat daerah.

Bertambahnya nilai persediaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya peningkatan pengadaan kebutuhan operasional kantor menjelang akhir tahun anggaran, efisiensi penggunaan barang sehingga masih terdapat sisa persediaan yang layak pakai, serta pengelolaan persediaan yang lebih baik untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan persediaan barang habis pakai pada akhir Tahun 2025 berada pada tingkat yang memadai untuk mendukung operasional organisasi. Namun demikian, perlu dilakukan pengendalian persediaan secara optimal agar jumlah persediaan yang tersedia tetap sesuai dengan kebutuhan riil dan tidak menimbulkan penumpukan barang yang berlebihan di masa mendatang.

4.2.2 Aset Tetap

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3	ASET TETAP	17.581.932.987,00	758.516.734,00

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 yang terdiri dari :

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3	ASET TETAP	17.581.932.987,00	758.516.734,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	3.694.084.891,00	3.294.381.205,00
1.3.02.01	Alat Besar	141.400.000,00	141.400.000,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	141.400.000,00	141.400.000,00
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	141.400.000,00	141.400.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	685.800.000,00	685.800.000,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	685.800.000,00	685.800.000,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	547.700.000,00	547.700.000,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	138.100.000,00	138.100.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	21.250.000,00	21.250.000,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	21.250.000,00	21.250.000,00
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	12.000.000,00	12.000.000,00

1.3.02.03.03.0009	Alat Ukur Lain-Lain	9.250.000,00	9.250.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.191.290.436,00	922.061.250,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	332.098.000,00	291.608.000,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	1.450.000,00	1.450.000,00
1.3.02.05.01.0003	Alat Reproduksi (Penggandaan)	29.200.000,00	29.200.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	157.959.000,00	148.599.000,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	143.489.000,00	112.359.000,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	623.827.436,00	395.088.250,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	270.795.686,00	86.056.500,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	4.700.000,00	4.700.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	259.965.750,00	215.965.750,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	7.610.000,00	7.610.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	79.669.000,00	79.669.000,00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	1.087.000,00	1.087.000,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	235.365.000,00	235.365.000,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	72.250.000,00	72.250.000,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	4.000.000,00	4.000.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	67.415.000,00	67.415.000,00
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	5.000.000,00	5.000.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	86.700.000,00	86.700.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	119.475.000,00	119.475.000,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	93.725.000,00	93.725.000,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	50.175.000,00	50.175.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	41.100.000,00	41.100.000,00
1.3.02.06.01.0004	Peralatan Cetak	2.450.000,00	2.450.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	25.750.000,00	25.750.000,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	25.750.000,00	25.750.000,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.765.000,00	2.765.000,00
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	2.765.000,00	2.765.000,00
1.3.02.07.01.0012	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	2.765.000,00	2.765.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	4.100.000,00	4.100.000,00
1.3.02.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	4.100.000,00	4.100.000,00

1.3.02.08.04.0005	System/Power Supply	4.100.000,00	4.100.000,00
1.3.02.09	Alat Persenjataan	56.225.000,00	56.225.000,00
1.3.02.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	22.400.000,00	22.400.000,00
1.3.02.09.02.0001	Alat Keamanan	22.400.000,00	22.400.000,00
1.3.02.09.04	Alat Khusus Kepolisian	33.825.000,00	33.825.000,00
1.3.02.09.04.0002	Alat Dalmas/Alat Dakhura	33.825.000,00	33.825.000,00
1.3.02.10	Komputer	1.471.779.455,00	1.341.304.955,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	1.085.548.806,00	969.174.306,00
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	19.840.000,00	19.840.000,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	1.042.208.806,00	925.834.306,00
1.3.02.10.01.0003	Komputer Unit Lainnya	23.500.000,00	23.500.000,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	386.230.649,00	372.130.649,00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	4.921.000,00	4.921.000,00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	822.000,00	822.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	221.228.277,00	207.128.277,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	136.909.372,00	136.909.372,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	22.350.000,00	22.350.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	18.237.998.712,00	0,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	18.237.998.712,00	0,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	18.237.998.712,00	0,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	18.237.998.712,00	0,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	9.500.000,00	9.500.000,00
1.3.05.01	Bahan PeRp. ustakaan	9.500.000,00	9.500.000,00
1.3.05.01.01	Bahan PeRp. ustakaan Tercetak	9.500.000,00	9.500.000,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	9.500.000,00	9.500.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(4.359.650.616,00)	(2.545.364.471,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.949.315.623,00)	(2.545.364.471,00)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(141.400.000,00)	0,00
1.3.07.01.01.0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(141.400.000,00)	0,00
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(540.850.000,00)	0,00
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(402.750.000,00)	0,00

1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(138.100.000,00)	0,00
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(21.250.000,00)	0,00
1.3.07.01.03.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(12.000.000,00)	0,00
1.3.07.01.03.0044	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	(9.250.000,00)	0,00
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(909.463.048,00)	(2.545.364.471,00)
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(1.450.000,00)	0,00
1.3.07.01.05.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	(29.200.000,00)	0,00
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(149.691.000,00)	0,00
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(89.274.034,00)	(2.545.364.471,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(199.978.996,00)	0,00
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(4.700.000,00)	0,00
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(161.896.917,00)	0,00
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(6.785.500,00)	0,00
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(71.660.667,00)	0,00
1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(1.087.000,00)	0,00
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(50.396.667,00)	0,00
1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(4.000.000,00)	0,00
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(47.642.267,00)	0,00

1.3.07.01.05.0018	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	(5.000.000,00)	0,00
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(86.700.000,00)	0,00
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(107.999.166,00)	0,00
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(49.075.000,00)	0,00
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(32.112.500,00)	0,00
1.3.07.01.06.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	(1.061.666,00)	0,00
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(25.750.000,00)	0,00
1.3.07.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(2.765.000,00)	0,00
1.3.07.01.07.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	(2.765.000,00)	0,00
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(888.333,00)	0,00
1.3.07.01.08.0091	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply	(888.333,00)	0,00
1.3.07.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(56.225.000,00)	0,00
1.3.07.01.09.0011	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan	(22.400.000,00)	0,00
1.3.07.01.09.0019	Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alat Dalmas/Alat Dakhura	(33.825.000,00)	0,00
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(1.168.475.076,00)	0,00
1.3.07.01.10.0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(19.840.000,00)	0,00
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(785.600.038,00)	0,00
1.3.07.01.10.0003	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	(10.183.333,00)	0,00
1.3.07.01.10.0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	(4.921.000,00)	0,00

1.3.07.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(822.000,00)	0,00
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(201.467.551,00)	0,00
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(135.956.154,00)	0,00
1.3.07.01.10.0008	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	(9.685.000,00)	0,00
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.410.334.993,00)	0,00
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(1.410.334.993,00)	0,00
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(1.410.334.993,00)	0,00
	JUMLAH ASET TETAP	17.581.932.987,00	758.516.734,00

(Rincian Aset dari Akun Aset Tetap terlampir)

Berdasarkan Neraca Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, nilai Aset Tetap Tahun 2025 tercatat sebesar Rp. 17.581.932.987,00, meningkat signifikan dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp. 758.516.734,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp. 16.823.416.253,00 atau sekitar 2.217,92%.

Peningkatan nilai aset tetap tersebut terutama disebabkan oleh pengakuan Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Gedung Kantor senilai Rp. 18.237.998.712,00 yang pada Tahun 2024 belum tercatat dalam neraca perangkat daerah. Penambahan aset gedung kantor ini menjadi faktor utama yang menyebabkan lonjakan nilai aset tetap pada Tahun 2025.

Selain itu, nilai Peralatan dan Mesin juga mengalami peningkatan dari Rp. 3.294.381.205,00 pada Tahun 2024 menjadi Rp. 3.694.084.891,00 pada Tahun 2025 atau bertambah sebesar Rp. 399.703.686,00. Kenaikan tersebut berasal dari pengadaan berbagai sarana dan prasarana penunjang operasional kantor, terutama pada kelompok Alat Kantor dan Rumah Tangga serta Komputer dan Peralatan Komputer.

Pada kelompok Alat Kantor dan Rumah Tangga, terjadi peningkatan sebesar Rp. 269.229.186,00, yang terutama berasal dari penambahan mebel, alat pendingin ruangan, serta perlengkapan kantor lainnya guna mendukung kenyamanan dan efektivitas lingkungan kerja. Sementara itu,

kelompok Komputer meningkat sebesar Rp. 130.474.500,00, yang menunjukkan adanya penguatan infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung pelayanan perizinan dan administrasi berbasis elektronik.

Di sisi lain, nilai Aset Tetap Lainnya berupa bahan peRp. ustakaan tetap sebesar Rp. 9.500.000,00, sehingga tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.

Sejalan dengan bertambahnya aset tetap yang dimiliki, nilai Akumulasi Penyusutan juga meningkat dari Rp. 2.545.364.471,00 pada Tahun 2024 menjadi Rp. 4.359.650.616,00 pada Tahun 2025 atau bertambah sebesar Rp. 1.814.286.145,00. Peningkatan ini menunjukkan bahwa aset yang dimiliki telah digunakan dalam mendukung operasional organisasi dan telah dihitung beban penyusutannya sesuai ketentuan akuntansi pemerintah.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi kenaikan aset tetap pada Tahun 2025 antara lain

1. Pengakuan aset Gedung Kantor yang sebelumnya belum tercatat pada neraca perangkat daerah.
2. Penambahan sarana dan prasarana kerja, khususnya mebel, peralatan kantor, komputer, dan perangkat pendukung pelayanan.
3. Peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan publik untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kubu Raya.
4. Penyesuaian dan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang lebih tertib sehingga aset yang telah memenuhi kriteria pengakuan dapat dicatat dalam laporan keuangan.
5. Peningkatan akumulasi penyusutan sebagai konsekuensi atas bertambahnya aset yang digunakan dalam kegiatan operasional.

4.2.3 Aset Lainnya

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.5	ASET LAINNYA	39.732.917,00	65.360.417,00

Jumlah tersebut merupakan saldo aset lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 yang terdiri dari :

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.5	ASET LAINNYA	39.732.917,00	65.360.417,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	152.010.000,00	701.692.000,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	152.010.000,00	701.692.000,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	152.010.000,00	701.692.000,00
1.5.03.01.01.005	Software	152.010.000,00	701.692.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	949.762.525,00	400.080.525,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	949.762.525,00	400.080.525,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	949.762.525,00	400.080.525,00
1.5.04.01.01.001	Aset Rusak Berat/Usang	400.080.525,00	400.080.525,00
1.5.04.01.01.002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	549.682.000,00	0,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(113.047.083,00)	(637.101.583,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(113.047.083,00)	(637.101.583,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(113.047.083,00)	(637.101.583,00)
1.5.05.01.01.004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(113.047.083,00)	(637.101.583,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(948.992.525,00)	(399.310.525,00)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(948.992.525,00)	(399.310.525,00)
1.5.06.01.01	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	235.928.310,00
1.5.06.01.01.001	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	0,00	235.928.310,00
1.5.06.01.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(948.992.525,00)	(635.238.835,00)
1.5.06.01.02.001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(399.310.525,00)	(635.238.835,00)
1.5.06.01.02.002	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(549.682.000,00)	0,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	39.732.917,00	65.360.417,00

Berdasarkan Neraca Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, nilai Aset Lainnya pada Tahun 2025 sebesar Rp. 39.732.917,00, mengalami penurunan sebesar Rp. 25.627.500,00 atau 39,21% dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar Rp. 65.360.417,00.

Penurunan nilai aset lainnya dipengaruhi oleh berkurangnya nilai Aset Tidak Berwujud (Software) yang pada Tahun 2024 tercatat sebesar Rp. 701.692.000,00 dan pada Tahun 2025 menjadi Rp. 152.010.000,00, atau menurun sebesar Rp. 549.682.000,00. Penurunan tersebut dapat disebabkan oleh reklasifikasi aset, penghapusan aset yang telah habis masa manfaatnya, atau penyesuaian pencatatan aset tidak berwujud sesuai hasil inventarisasi dan penatausahaan aset.

Di sisi lain, nilai Aset Lain-lain meningkat dari Rp. 400.080.525,00 pada Tahun 2024 menjadi Rp. 949.762.525,00 pada Tahun 2025. Kenaikan sebesar Rp. 549.682.000,00 tersebut berasal dari pencatatan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah yang pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp. 549.682.000,00, sedangkan pada Tahun 2024 belum terdapat saldo pada akun tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya aset yang masih memiliki nilai ekonomis namun tidak lagi digunakan dalam mendukung operasional perangkat daerah dan telah direklasifikasi ke kelompok aset lainnya.

Selanjutnya, nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud mengalami penurunan dari Rp. 637.101.583,00 menjadi Rp. 113.047.083,00. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya nilai aset software yang masih tercatat pada Tahun 2025 sehingga nilai amortisasi yang diakui juga menjadi lebih kecil.

Sementara itu, Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya meningkat dari Rp. 399.310.525,00 menjadi Rp. 948.992.525,00. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh penyusutan atas aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah sebesar Rp. 549.682.000,00, yang telah direklasifikasi ke kelompok aset lainnya pada Tahun 2025.

Secara keseluruhan, nilai Aset Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 25.627.500,00 atau 39,21% dibandingkan Tahun 2024. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya nilai aset tidak berwujud berupa software serta adanya reklasifikasi aset ke kelompok Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah. Meskipun nilai aset lain-lain meningkat, peningkatan akumulasi penyusutan menyebabkan nilai bersih Aset Lainnya pada

akhir Tahun 2025 menjadi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan adanya penataan dan pengelolaan aset yang lebih tertib sesuai dengan ketentuan akuntansi pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah.

4.2.4 Kewajiban

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
	KEWAJIBAN	0	313.242.117

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2025 adalah 0 dan tahun 2024 sebesar Rp. 313.242.117,00 yang sudah dibayar pada tahun 2024.

4.2.5. Ekuitas

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
3	EKUITAS	17.630.693.904,00	824.465.151,00

Jumlah ekuitas pada Tahun 2025 sebesar Rp. 17.630.693.904,00 meningkat sebesar Rp. 16.806.228.753,00 dibandingkan tahun 2024.

Rincian ekuitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
3	EKUITAS	17.630.693.904,00	824.465.151,00
3.1	EKUITAS	17.630.693.904,00	824.465.151,00
3.1.01	Ekuitas	10.674.365.697,00	(29.323.355.781,00)
3.1.01.01	Ekuitas	18.118.564.736,00	(22.945.405.214,00)
3.1.01.01.01	Ekuitas	18.118.564.736,00	(22.945.405.214,00)
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	18.118.564.736,00	(22.945.405.214,00)
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(7.444.199.039,00)	(6.377.950.567,00)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(7.444.199.039,00)	(6.377.950.567,00)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(7.444.199.039,00)	(6.377.950.567,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	6.956.328.207,00	30.147.820.932,00
3.1.03.01	RK PPKD	6.956.328.207,00	30.147.820.932,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	6.956.328.207,00	30.147.820.932,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	6.956.328.207,00	30.147.820.932,00
	JUMLAH EKUITAS	17.630.693.904,00	824.465.151,00

Berdasarkan Neraca Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, nilai Ekuitas pada Tahun 2025 sebesar Rp. 17.630.693.904,00, meningkat signifikan dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp. 824.465.151,00. Dengan demikian terjadi kenaikan sebesar Rp. 16.806.228.753,00 atau sekitar 2.038,45%.

Peningkatan ekuitas ini menunjukkan adanya peningkatan nilai kekayaan bersih pemerintah daerah yang dikelola oleh perangkat daerah sebagai akibat bertambahnya aset yang dimiliki, terutama dari pengakuan aset tetap berupa gedung kantor serta penambahan sarana dan prasarana pendukung operasional.

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	17.630.693.904,00	824.465.151,00

Jumlah kewajiban dan ekuitas pada tahun 2025 sebesar Rp. 17.630.693.904,00 dan tahun 2024 sebesar Rp. 824.465.151,00.

4.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)

4.3.1. Beban Operasi

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1	BEBAN OPERASI	6.732.923.707,00	6.023.404.984,00	709.518.723,00	11,78

Pada tahun 2025, realisasi Beban Operasi sebesar Rp. 6.732.923.707,00, meningkat sebesar Rp. 709.518.723,00 atau 11,78% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp. 6.023.404.984,00.

Peningkatan beban operasi tersebut menunjukkan adanya kenaikan pengeluaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama tahun 2025. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya belanja pegawai akibat bertambahnya jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Secara keseluruhan, peningkatan 11,78% pada beban operasi mencerminkan adanya

peningkatan aktivitas operasional dan kebutuhan sumber daya dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pada tahun 2025.

Adapun rincian beban operasional tersebut sebagai berikut:

a. Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.312.701.382,00	1.989.492.426,00	323.208.956,00	16,25
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	1.515.992.839,00	1.408.498.929,00	107.493.910,00	7,63
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	1.297.073.240,00	1.347.874.929,00	(50.801.689,00)	(3,77)
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	218.919.599,00	60.624.000,00	158.295.599,00	261,11
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	142.493.308,00	143.239.112,00	(745.804,00)	(0,52)
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	126.987.054,00	135.964.232,00	(8.977.178,00)	(6,60)
8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	15.506.254,00	7.274.880,00	8.231.374,00	113,15
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	90.090.000,00	108.430.000,00	(18.340.000,00)	(16,91)
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	90.090.000,00	108.430.000,00	(18.340.000,00)	(16,91)
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	105.872.040,00	86.416.000,00	19.456.040,00	22,51
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	95.972.040,00	86.416.000,00	9.556.040,00	11,06
8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	100,00
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	28.444.583,00	21.780.000,00	6.664.583,00	30,60
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	19.610.000,00	18.130.000,00	1.480.000,00	8,16
8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	8.834.583,00	3.650.000,00	5.184.583,00	142,04
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	78.829.170,00	75.606.480,00	3.222.690,00	4,26
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	67.133.340,00	71.261.280,00	(4.127.940,00)	(5,79)
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	11.695.830,00	4.345.200,00	7.350.630,00	169,17
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	198.817.367,00	6.668.781,00	192.148.586,00	2.881,31
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	198.817.367,00	6.668.781,00	192.148.586,00	2.881,31
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	20.491,00	18.706,00	1.785,00	9,54
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	14.961,00	17.606,00	(2.645,00)	(15,02)

8.1.01.01.0 8.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	5.530,00	1.100,00	4.430,00	402,73
8.1.01.01.0 9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	139.458.968,0 0	127.236.519,00	12.222.449, 00	9,61
8.1.01.01.0 9.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	118.596.788,0 0	122.314.884,00	(3.718.096, 00)	(3,04)
8.1.01.01.0 9.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	20.862.180,00	4.921.635,00	15.940.545, 00	323,89
8.1.01.01.1 0	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.170.674,00	2.899.460,00	271.214,00	9,35
8.1.01.01.1 0.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.673.136,00	2.768.510,00	(95.374,00)	(3,44)
8.1.01.01.1 0.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	497.538,00	130.950,00	366.588,00	279,95
8.1.01.01.1 1	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	9.511.942,00	8.698.439,00	813.503,00	9,35
8.1.01.01.1 1.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	8.019.382,00	8.305.598,00	(286.216,00)	(3,45)
8.1.01.01.1 1.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.492.560,00	392.841,00	1.099.719,0 0	279,94
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.435.394.288, 00	1.877.794.759, 00	557.599.529, 00	29,69
8.1.01.02.0 1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	811.113.479,0 0	622.004.945,00	189.108.534, 00	30,40
8.1.01.02.0 1.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	708.330.708,0 0	599.074.260,00	109.256.448, 00	18,24
8.1.01.02.0 1.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	102.782.771,0 0	22.930.685,00	79.852.086, 00	348,23
8.1.01.02.0 3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	414.567.251,0 0	331.269.948,00	83.297.303, 00	25,14
8.1.01.02.0 3.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	375.706.405,0 0	328.212.524,00	47.493.881, 00	14,47
8.1.01.02.0 3.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	38.860.846,00	3.057.424,00	35.803.422, 00	1.171, 03
8.1.01.02.0 5	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.209.713.558, 00	924.519.866,00	285.193.692, 00	30,85
8.1.01.02.0 5.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.055.461.501, 00	890.123.834,00	165.337.667, 00	18,57
8.1.01.02.0 5.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	154.252.057,0 0	34.396.032,00	119.856.025, 00	348,46

8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	22.200.000,00	(22.200.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	0,00	22.200.000,00	(22.200.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	22.200.000,00	(22.200.000,00)	(100,00)

Pada tahun 2025, Beban Pegawai didominasi oleh Beban Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 2.312.701.382,00 dan Beban Tambahan Penghasilan ASN (TPP) sebesar Rp. 2.435.394.288,00. Dibandingkan tahun 2024, Beban Gaji dan Tunjangan ASN meningkat Rp. 323.208.956,00 atau 16,25%, sedangkan Beban Tambahan Penghasilan ASN meningkat Rp. 557.599.529,00 atau 29,69%.

Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Peningkatan Beban Gaji dan Tunjangan ASN terutama dipengaruhi oleh bertambahnya komponen penghasilan bagi pegawai PPPK. Hal ini terlihat dari kenaikan

- Beban Gaji Pokok PPPK sebesar 261,11% dari Rp. 60.624.000,00 menjadi Rp. 218.919.599,00.
- Tunjangan Keluarga PPPK meningkat 113,15%.
- Tunjangan Fungsional Umum PPPK meningkat 142,04%.
- Tunjangan Beras PPPK meningkat 169,17%.
- Iuran Jaminan Kesehatan PPPK meningkat 323,89%.
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK dan Iuran Jaminan Kematian PPPK masing-masing meningkat sekitar 279,95%.

Peningkatan tersebut diakibatkan adanya penambahan jumlah PPPK sebanyak 7 orang sehingga hak-hak kepegawaiannya meningkat pada tahun 2025.

Sementara itu, beberapa komponen yang terkait dengan PNS mengalami penurunan, antara lain:

- Gaji Pokok PNS turun 3,77%.
- Tunjangan Keluarga PNS turun 6,60%.
- Tunjangan Jabatan PNS turun 16,91%.
- Tunjangan Beras PNS turun 5,79%.

- Iuran Jaminan Kesehatan PNS turun 3,04%.

Penurunan tersebut dapat disebabkan oleh adanya pegawai yang memasuki masa pensiun, mutasi, perubahan jabatan, atau perubahan komposisi pegawai selama tahun berjalan.

Selain itu, terdapat peningkatan yang sangat signifikan pada Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebesar 2.881,31%, dari Rp. 6.668.781,00 menjadi Rp. 198.817.367,00 yang disebabkan oleh penerapan perhitungan pajak penghasilan (PPh 21) dengan skema Tarif efektif rata. Kenaikan ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong meningkatnya Beban Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun 2025.

Beban Tambahan Penghasilan ASN (TPP)

Beban Tambahan Penghasilan ASN meningkat sebesar Rp. 557.599.529,00 atau 29,69% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi pada seluruh komponen TPP, yaitu:

- Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 30,40%.
- Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN meningkat 25,14%.
- Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN meningkat 30,85%.

Kenaikan TPP juga sangat dipengaruhi oleh meningkatnya pembayaran TPP kepada PPPK, yang mengalami kenaikan cukup tinggi, antara lain:

- Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK naik 348,23%.
- Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK naik 1.171,03%.
- Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK naik 348,46%.

Peningkatan ini diakibatkan oleh bertambahnya jumlah pegawai baik PNS maupun PPPK serta optimalisasi kebijakan pemberian TPP.

Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Pada tahun 2025 tidak terdapat realisasi Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, sehingga akun ini mengalami penurunan sebesar 100% dari Rp. 22.200.000,00 pada tahun 2024 menjadi nihil pada tahun 2025.

Secara keseluruhan, peningkatan Beban Pegawai tahun 2025 terutama disebabkan oleh bertambahnya beban gaji, tunjangan, dan jaminan sosial bagi PPPK, dan Kenaikan signifikan pada Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN. Meskipun beberapa komponen yang terkait dengan PNS mengalami penurunan, kenaikan pada komponen PPPK dan TPP mampu mendorong total Beban Pegawai menjadi lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Hal ini mencerminkan perubahan komposisi sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan ASN dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

b. Beban Barang

Rincian beban barang dapat dilihat berikut ini:

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.01	Beban Barang	629.974.450,00	455.020.213,00	174.954.237,00	38,45
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	629.974.450,00	455.020.213,00	174.954.237,00	38,45
8.1.02.01.01.001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	25.220.000,00	2.550.000,00	22.670.000,00	889,02
8.1.02.01.01.004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	1.409.300,00	(1.409.300,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.249.421,00	30.648.025,00	(8.398.604,00)	(27,40)
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	47.878.000,00	37.800.000,00	10.078.000,00	26,66
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	121.258.254,00	66.449.488,00	54.808.766,00	82,48
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.480.000,00	1.120.000,00	360.000,00	32,14

8.1.02.01.01.0 030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	20.206.545,00	3.871.535,00	16.335.010,0 0	421,93
8.1.02.01.01.0 031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.061.720,00	0,00	6.061.720,00	100,00
8.1.02.01.01.0 032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	10.027.017,00	0,00	10.027.017,0 0	100,00
8.1.02.01.01.0 035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	0,00	18.480.000,00	(18.480.000,0 0)	(100,00)
8.1.02.01.01.0 036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	192.994.318,0 0	8.381.865,00	184.612.453,0 00	2.202,5 2
8.1.02.01.01.0 043	Beban Natura dan Pakan-Natura	22.759.175,00	61.600.000,00	(38.840.825,0 0)	(63,05)
8.1.02.01.01.0 052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	159.840.000,0 0	187.460.000,0 0	(27.620.000,0 0)	(14,73)
8.1.02.01.01.0 063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	35.250.000,00	(35.250.000,0 0)	(100,00)

Pada Tahun 2025, realisasi Beban Barang sebesar Rp. 629.974.450,00, meningkat sebesar Rp. 174.954.237,00 atau 38,45% dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar Rp. 455.020.213,00. Kenaikan tersebut seluruhnya berasal dari kelompok Beban Barang Pakai Habis. Peningkatan Beban Barang terutama dipengaruhi oleh kenaikan pada beberapa akun, antara lain:

- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya meningkat sebesar Rp. 184.612.453,00 atau 2.202,52%, dari Rp. 8.381.865,00 menjadi Rp. 192.994.318,00.
- Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi meningkat sebesar Rp. 22.670.000,00 atau 889,02%, dari Rp. 2.550.000,00 menjadi Rp. 25.220.000,00.
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor meningkat sebesar Rp. 16.335.010,00 atau 421,93%, dari Rp. 3.871.535,00 menjadi Rp. 20.206.545,00.

- Beban alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak meningkat sebesar Rp. 54.808.766,00 atau 82,48%, dari Rp. 66.449.488,00 menjadi Rp. 121.258.254,00.
- Beban Kertas dan Cover meningkat sebesar Rp. 10.078.000,00 atau 26,66%, dari Rp. 37.800.000,00 menjadi Rp. 47.878.000,00.
- Pada Tahun 2025 juga terdapat realisasi pada akun Alat Listrik sebesar Rp. 6.061.720,00 dan Perlengkapan Dinas sebesar Rp. 10.027.017,00, yang pada Tahun 2024 tidak terdapat realisasi.

Di sisi lain, terdapat beberapa akun yang mengalami penurunan, yaitu:

- Beban Natura dan Pakan – Natura turun sebesar Rp. 38.840.825,00 atau 63,05%.
- Beban Makanan dan Minuman Rapat turun sebesar Rp. 27.620.000,00 atau 14,73%.
- Beban Alat Tulis Kantor turun sebesar Rp. 8.398.604,00 atau 27,40%.

Selain itu, beberapa akun yang terealisasi pada Tahun 2024 tidak lagi terealisasi pada Tahun 2025, yaitu:

- Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp. 1.409.300,00.
- Beban Suvenir/Cendera Mata sebesar Rp. 18.480.000,00.
- Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp. 35.250.000,00.

Secara keseluruhan, kenaikan Beban Barang Tahun 2025 terutama disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan bahan dan perlengkapan pendukung kegiatan perkantoran, khususnya pada akun alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, bahan cetak, perabot kantor, serta bahan bangunan dan konstruksi yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah selama tahun berjalan.

c. Beban Jasa

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.02	Beban Jasa	1.077.314.613,00	1.410.881.417,00	(333.566.804,00)	(23,64)
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	1.051.082.401,00	1.373.952.316,00	(322.869.915,00)	(23,50)
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.000.000,00	14.975.000,00	(4.975.000,00)	(33,22)

8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	52.350.000,00	(52.350.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	460.000.000,00	734.758.747,00	(274.758.747,00)	(37,39)
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	11.900.000,00	150.000,00	11.750.000,00	7.833,33
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	124.200.000,00	0,00	124.200.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,00	17.051.000,00	(17.051.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	4.356.900,00	3.115.393,00	1.241.507,00	39,85
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	9.140.500,00	11.632.900,00	(2.492.400,00)	(21,43)
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	54.066.753,00	215.241.227,00	(161.174.474,00)	(74,88)
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	2.160.000,00	(2.160.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	308.323.248,00	308.124.049,00	199.199,00	0,06
8.1.02.02.01.0071	Beban Lembur	46.895.000,00	14.394.000,00	32.501.000,00	225,80
8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	22.200.000,00	0,00	22.200.000,00	100,00

Pada Tahun 2025, realisasi Beban Jasa sebesar Rp. 1.077.314.613,00, mengalami penurunan sebesar Rp. 333.566.804,00 atau 23,64% dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar Rp. 1.410.881.417,00. Penurunan tersebut terutama berasal dari kelompok Beban Jasa Kantor yang turun sebesar Rp. 322.869.915,00 atau 23,50%. Penurunan Beban Jasa terutama disebabkan oleh berkurangnya realisasi pada beberapa akun, antara lain:

- Beban Jasa Tenaga Administrasi turun sebesar Rp. 274.758.747,00 atau 37,39%, dari Rp. 734.758.747,00 menjadi Rp. 460.000.000,00.
- Beban Tagihan Listrik turun sebesar Rp. 161.174.474,00 atau 74,88%, dari Rp. 215.241.227,00 menjadi Rp. 54.066.753,00.
- Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan tidak terealisasi pada Tahun 2025, sedangkan pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 52.350.000,00.

- Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan tidak terealisasi pada Tahun 2025, sedangkan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 17.051.000,00.
- Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah tidak terealisasi pada Tahun 2025, sedangkan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 2.160.000,00.
- Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia turun sebesar Rp. 4.975.000,00 atau 33,22%.
- Beban Tagihan Air turun sebesar Rp. 2.492.400,00 atau 21,43%.

Di sisi lain, terdapat beberapa akun yang mengalami peningkatan, yaitu:

- Beban Jasa Tenaga Kebersihan terealisasi sebesar Rp. 124.200.000,00 pada Tahun 2025, sementara pada Tahun 2024 tidak terdapat realisasi.
- Beban Lembur meningkat sebesar Rp. 32.501.000,00 atau 225,80%, dari Rp. 14.394.000,00 menjadi Rp. 46.895.000,00.
- Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan terealisasi sebesar Rp. 22.200.000,00, sedangkan pada Tahun 2024 tidak terdapat realisasi.
- Beban Jasa Tenaga Ahli meningkat sebesar Rp. 11.750.000,00 atau 7.833,33%, dari Rp. 150.000,00 menjadi Rp. 11.900.000,00.
- Beban Tagihan Telepon meningkat sebesar Rp. 1.241.507,00 atau 39,85%.
- Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan relatif stabil dengan kenaikan sebesar Rp. 199.199,00 atau 0,06%.

Secara keseluruhan, penurunan Beban Jasa Tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh berkurangnya penggunaan jasa tenaga administrasi dan menurunnya biaya utilitas, khususnya tagihan listrik, serta tidak adanya realisasi pada beberapa jenis honorarium dan jasa pendukung kegiatan yang pada tahun sebelumnya masih dianggarkan. Namun demikian, peningkatan kebutuhan jasa tenaga kebersihan, lembur pegawai, dan tenaga ahli menjadi faktor yang menahan laju penurunan Beban Jasa pada tahun berjalan.

d. Beban Pemeliharaan

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	136.853.854,00	86.146.180,00	50.707.674,00	58,86
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	136.853.854,00	86.146.180,00	50.707.674,00	58,86
8.1.02.03.02.0022	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00	5.760.000,00	(5.760.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	79.915.654,00	52.949.180,00	26.966.474,00	50,93
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.565.200,00	863.000,00	3.702.200,00	428,99
8.1.02.03.02.0043	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	2.209.000,00	(2.209.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	21.785.000,00	3.600.000,00	18.185.000,00	505,14
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	20.318.000,00	6.059.000,00	14.259.000,00	235,34
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.270.000,00	7.850.000,00	2.420.000,00	30,83
8.1.02.03.02.0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	6.856.000,00	(6.856.000,00)	(100,00)

Pada Tahun 2025, realisasi Beban Pemeliharaan sebesar Rp. 136.853.854,00, meningkat sebesar Rp. 50.707.674,00 atau 58,86% dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar Rp. 86.146.180,00. Seluruh realisasi tersebut berasal dari Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin. Peningkatan Beban Pemeliharaan terutama disebabkan oleh kenaikan realisasi pada beberapa akun, antara lain:

- Beban Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan meningkat sebesar Rp. 26.966.474,00 atau 50,93%, dari Rp. 52.949.180,00 menjadi Rp. 79.915.654,00.
- Beban Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya meningkat sebesar Rp. 18.185.000,00 atau 505,14%, dari Rp. 3.600.000,00 menjadi Rp. 21.785.000,00.
- Beban Pemeliharaan Alat Pendingin meningkat sebesar Rp. 14.259.000,00 atau 235,34%, dari Rp. 6.059.000,00 menjadi Rp. 20.318.000,00.
- Beban Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua meningkat sebesar Rp. 3.702.200,00 atau 428,99%, dari Rp. 863.000,00 menjadi Rp. 4.565.200,00.
- Beban Pemeliharaan Personal Computer meningkat sebesar Rp. 2.420.000,00 atau 30,83%, dari Rp. 7.850.000,00 menjadi Rp. 10.270.000,00.

Di sisi lain, terdapat beberapa akun yang tidak lagi terealisasi pada Tahun 2025, yaitu:

- Beban Pemeliharaan Electric Generating Set (Genset) yang pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 5.760.000,00.
- Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya yang pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 2.209.000,00.
- Beban Pemeliharaan Peralatan Personal Computer yang pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 6.856.000,00.

Secara keseluruhan, kenaikan Beban Pemeliharaan Tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan pemeliharaan aset operasional, terutama kendaraan dinas, peralatan kantor, perangkat pendingin ruangan, dan komputer. Peningkatan tersebut dilakukan untuk menjaga kondisi dan kinerja aset agar tetap optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama tahun berjalan.

e. Beban Perjalanan Dinas

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	140.685.120,00	181.869.989,00	(41.184.869,00)	(22,65)
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	140.685.120,00	181.869.989,00	(41.184.869,00)	(22,65)
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	110.249.394,00	37.169.377,00	73.080.017,00	196,61
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.435.726,00	144.700.612,00	(114.264.886,00)	(78,97)

Pada Tahun 2025, realisasi Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp140.685.120,00, mengalami penurunan sebesar Rp41.184.869,00 atau 22,65% dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar Rp181.869.989,00. Seluruh realisasi tersebut berasal dari Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

Penurunan Beban Perjalanan Dinas dipengaruhi oleh perubahan komposisi pelaksanaan perjalanan dinas selama tahun berjalan. Pada satu sisi, terdapat peningkatan pada:

- Beban Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 73.080.017,00 atau 196,61%, dari Rp37.169.377,00 pada Tahun 2024 menjadi Rp. 110.249.394,00 pada Tahun 2025.

Namun demikian, peningkatan tersebut tidak mampu mengimbangi penurunan yang terjadi pada:

- Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota yang turun sebesar Rp. 114.264.886,00 atau 78,97%, dari Rp. 144.700.612,00 pada Tahun 2024 menjadi Rp. 30.435.726,00 pada Tahun 2025.

Secara keseluruhan, penurunan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 menunjukkan adanya pengurangan frekuensi atau kebutuhan perjalanan dinas dalam kota dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun perjalanan dinas biasa mengalami peningkatan, besarnya penurunan pada perjalanan dinas dalam kota menyebabkan total Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2025 lebih rendah dibandingkan Tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan adanya penyesuaian pola pelaksanaan kegiatan kedinasan dan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas selama tahun berjalan.

f. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	326.976.491,00	306.826.417,00	20.150.074,00	6,57
8.1.08.01.01	Beban Penyusutan Alat Besar	11.783.333,00	0,00	11.783.333,00	100,00
8.1.08.01.01.0022	Beban Penyusutan Alat Bantu- Electric Generating Set	11.783.333,00	0,00	11.783.333,00	100,00
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	44.600.000,00	0,00	44.600.000,00	100,00
8.1.08.01.02.0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	44.600.000,00	0,00	44.600.000,00	100,00
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	113.651.936,00	306.826.417,00	(193.174.481,00)	(62,96)
8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	100,00
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	17.144.632,00	306.826.417,00	(289.681.785,00)	(94,41)
8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	41.322.837,00	0,00	41.322.837,00	100,00
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	28.151.000,00	0,00	28.151.000,00	100,00
8.1.08.01.05.0010	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	582.000,00	0,00	582.000,00	100,00
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.590.000,00	0,00	5.590.000,00	100,00
8.1.08.01.05.0013	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	9.790.000,00	0,00	9.790.000,00	100,00
8.1.08.01.05.0014	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	666.667,00	0,00	666.667,00	100,00
8.1.08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	9.312.800,00	0,00	9.312.800,00	100,00
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.720.000,00	0,00	4.720.000,00	100,00
8.1.08.01.06.0001	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
8.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00	100,00
8.1.08.01.06.0004	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00
8.1.08.01.08	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	410.000,00	0,00	410.000,00	100,00

8.1.08.01.0 8.0092	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Measuring/Testing Device	410.000,00	0,00	410.000,00	100,00
8.1.08.01.1 0	Beban Penyusutan Komputer	151.811.222,00	0,00	151.811.222,00	100,00
8.1.08.01.1 0.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	125.481.558,00	0,00	125.481.558,00	100,00
8.1.08.01.1 0.0003	Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	100,00
8.1.08.01.1 0.0004	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	820.167,00	0,00	820.167,00	100,00
8.1.08.01.1 0.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	15.897.622,00	0,00	15.897.622,00	100,00
8.1.08.01.1 0.0007	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	441.875,00	0,00	441.875,00	100,00
8.1.08.01.1 0.0008	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.470.000,00	0,00	4.470.000,00	100,00

Pada Tahun 2025, realisasi Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 326.976.491,00, meningkat sebesar Rp. 20.150.074,00 atau 6,57% dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar Rp. 306.826.417,00.

Peningkatan beban penyusutan tersebut terjadi meskipun terdapat penurunan signifikan pada kelompok Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga, yang turun sebesar Rp. 193.174.481,00 atau 62,96%, dari Rp. 306.826.417,00 pada Tahun 2024 menjadi Rp. 113.651.936,00 pada Tahun 2025. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya beban penyusutan pada akun Alat Kantor Lainnya, yang turun sebesar Rp. 289.681.785,00 atau 94,41%.

Namun demikian, penurunan tersebut diimbangi oleh munculnya beban penyusutan pada beberapa kelompok aset yang pada Tahun 2024 belum disajikan secara terpisah atau belum memiliki beban penyusutan, antara lain:

- Beban Penyusutan Komputer sebesar Rp. 151.811.222,00, yang merupakan kontributor terbesar terhadap beban penyusutan tahun 2025, terdiri dari penyusutan personal computer, peralatan personal computer, peralatan jaringan, dan peralatan komputer lainnya.

- Beban Penyusutan Alat Angkutan sebesar Rp44.600.000,00.
- Beban Penyusutan Alat Besar (Electric Generating Set/Genset) sebesar Rp. 11.783.333,00.
- Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp. 4.720.000,00.
- Beban Penyusutan Alat Laboratorium sebesar Rp. 410.000,00.

Selain itu, dalam kelompok Alat Kantor dan Rumah Tangga, terdapat beberapa jenis aset yang mulai menimbulkan beban penyusutan pada Tahun 2025, antara lain:

- Mebel sebesar Rp. 41.322.837,00.
- Alat Pendingin sebesar Rp. 28.151.000,00.
- Alat Kantor Lainnya sebesar Rp. 17.144.632,00.
- Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebesar Rp. 19.769.467,00.
- Alat Rumah Tangga Lainnya sebesar Rp. 5.590.000,00.
- Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 1.092.000,00.
- Alat Dapur sebesar Rp. 582.000,00.

Secara keseluruhan, kenaikan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 menunjukkan bertambahnya aset tetap yang telah memasuki masa penyusutan serta adanya penyajian klasifikasi aset yang lebih rinci. Beban penyusutan terbesar berasal dari kelompok komputer dan peralatan teknologi informasi, yang mencerminkan besarnya porsi aset pendukung operasional berbasis teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama tahun berjalan.

g. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	358.671.341,00	0,00	358.671.341,00	100,00
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	358.671.341,00	0,00	358.671.341,00	100,00
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	358.671.341,00	0,00	358.671.341,00	100,00

Pada Tahun 2025, realisasi Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp358.671.341,00, sedangkan pada Tahun 2024 tidak

terdapat realisasi beban penyusutan pada kelompok aset tersebut. Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar Rp358.671.341,00 atau 100,00%.

Seluruh beban penyusutan tersebut berasal dari akun Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja – Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp358.671.341,00.

Munculnya beban penyusutan gedung dan bangunan pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa aset gedung kantor telah diperhitungkan sebagai aset tetap yang mengalami penurunan manfaat ekonomis seiring dengan masa penggunaannya. Selain itu, kondisi ini dapat mengindikasikan adanya penyempurnaan pencatatan dan pengelompokan aset tetap serta penerapan penyusutan yang lebih komprehensif sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 mencerminkan alokasi nilai perolehan gedung kantor ke dalam masa manfaat aset yang bersangkutan. Pengakuan beban penyusutan ini bertujuan untuk menyajikan nilai aset secara lebih wajar dalam laporan keuangan serta menggambarkan konsumsi manfaat aset tetap yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama tahun berjalan.

h. Beban amortisasi aset lainnya – aset tidak berwujud

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	25.627.500,00	47.719.166,00	(22.091.666,00)	(46,30)
8.1.08.06.01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	25.627.500,00	47.719.166,00	(22.091.666,00)	(46,30)
8.1.08.06.01.0004	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	25.627.500,00	47.719.166,00	(22.091.666,00)	(46,30)

Pada Tahun 2025, realisasi Beban Amortisasi Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud sebesar Rp25.627.500,00, mengalami penurunan sebesar Rp. 22.091.666,00 atau 46,30% dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar Rp. 47.719.166,00.

Seluruh beban amortisasi tersebut berasal dari akun Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud–Software, yang pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 25.627.500,00, lebih rendah dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp. 47.719.166,00.

Penurunan beban amortisasi ini menunjukkan bahwa nilai aset tidak berwujud yang diamortisasi pada Tahun 2025 lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh berkurangnya nilai buku aset software yang masih dalam masa manfaat, berakhirnya masa amortisasi beberapa aplikasi atau perangkat lunak yang dimiliki, atau tidak adanya penambahan aset software baru dengan nilai amortisasi yang signifikan.

Secara keseluruhan, Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 mencerminkan alokasi biaya perolehan software selama masa manfaatnya sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku. Penurunan beban amortisasi pada tahun berjalan menunjukkan berkurangnya porsi nilai aset tidak berwujud yang dibebankan sebagai biaya dibandingkan Tahun 2024, sejalan dengan berjalannya masa manfaat aset software yang dimiliki perangkat daerah.

i. Surplus/defisit dari operasi

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
	SURPLUS/ DEFISIT-LO	(7.444.199.039,00)	(6.377.950.567,00)	(1.066.248.472,00)	16,72

Pada Tahun 2025, Defisit Laporan Operasional (LO) sebesar Rp. 7.444.199.039,00, meningkat sebesar Rp. 1.066.248.472,00 atau 16,72% dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar Rp. 6.377.950.567,00.

Peningkatan defisit tersebut menunjukkan bahwa jumlah beban yang diakui pada Tahun 2025 lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh selama periode berjalan. Dibandingkan dengan Tahun 2024, kenaikan defisit terutama dipengaruhi oleh meningkatnya beberapa komponen beban operasional, antara lain Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, serta pengakuan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan yang pada tahun sebelumnya belum tercatat. Selain itu, terdapat pula beban penyusutan aset tetap lainnya yang relatif besar sehingga menambah total beban operasional tahun berjalan.

Meskipun terdapat beberapa pos beban yang mengalami penurunan, seperti Beban Jasa, Beban Perjalanan Dinas, dan Beban

Amortisasi Aset Tidak Berwujud, penurunan tersebut belum mampu mengimbangi peningkatan beban pada pos-pos lainnya. Akibatnya, total beban operasional pada Tahun 2025 meningkat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan operasional yang diperoleh.

Secara keseluruhan, Defisit LO Tahun 2025 mencerminkan bahwa sumber daya ekonomi yang dikonsumsi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan perangkat daerah lebih besar dibandingkan pendapatan yang dihasilkan selama tahun berjalan. Kenaikan defisit ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya beban operasional dan beban nonkas berupa penyusutan aset tetap, yang merupakan konsekuensi dari penggunaan aset dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

4.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	824.465.151,00	(22.943.998.755,32)
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(7.444.199.039,00)	(6.377.950.567,00)
RK PPKD	6.956.328.207,00	30.147.820.932,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	17.294.099.585,00	(1.406.458,68)
Mebel	184.739.186,00	0,00
Bangunan Gedung Kantor	18.237.998.712,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(2,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(76.974.659,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(1.051.663.652,00)	0,00
EKUITAS AKHIR	17.630.693.904,00	824.465.151,00

Nilai Ekuitas Akhir Tahun 2025 sebesar Rp. 17.630.693.904,00, meningkat sebesar Rp. 16.806.228.753,00 atau 2.038,45% dibandingkan Ekuitas Akhir Tahun 2024 sebesar Rp. 824.465.151,00. Perubahan ekuitas tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal Tahun 2025 tercatat sebesar Rp. 824.465.151,00, yang merupakan saldo ekuitas akhir Tahun 2024.
2. Defisit Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp. 7.444.199.039,00 yang mengurangi nilai ekuitas. Defisit ini lebih besar dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar Rp. 6.377.950.567,00.
3. RK PPKD sebesar Rp. 6.956.328.207,00 memberikan tambahan ekuitas yang berasal dari transaksi antara entitas akuntansi dengan Bendahara Umum Daerah (BUD)/PPKD. Namun demikian, nilai RK PPKD Tahun 2025 lebih rendah dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar Rp. 30.147.820.932,00.
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan Mendasar – Lain-lain memberikan tambahan ekuitas sebesar Rp. 17.294.099.585,00, yang merupakan faktor utama peningkatan ekuitas pada Tahun 2025. Nilai tersebut berasal dari:
 - Pengakuan Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp. 18.237.998.712,00.
 - Pengakuan Mebel sebesar Rp. 184.739.186,00.
 - Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja–Bangunan Gedung Kantor sebesar (Rp. 1.051.663.652,00).
 - Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga–Mebel sebesar (Rp. 76.974.659,00).
 - Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Alat Kantor–Alat Kantor Lainnya sebesar (Rp. 2,00).

Secara keseluruhan, meskipun Tahun 2025 masih mengalami Defisit LO sebesar Rp. 7,44 miliar, ekuitas tetap meningkat secara signifikan karena adanya pengakuan dan penyesuaian nilai aset tetap melalui koreksi dan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi. Penambahan aset berupa Bangunan Gedung Kantor dan Mebel menjadi faktor dominan yang mendorong kenaikan ekuitas, sehingga mampu menutupi pengaruh defisit operasional serta menghasilkan Ekuitas Akhir Tahun 2025 sebesar Rp. 17,63 miliar. Kondisi ini menunjukkan adanya penguatan posisi keuangan pemerintah daerah dari sisi nilai kekayaan bersih yang tercatat dalam laporan keuangan.

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Informasi Tambahan

Berdasarkan Undang-undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah pada pasal 1 ayat 4 yang dimaksud dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu, sedangkan pada ayat 5 Penyelenggara PTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dan sasaran penyelenggaraan PTSP Daerah yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan PTSP menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yaitu :

1. Tujuan

- a. Meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
- c. Meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

2. Sasaran

Sasaran penyelenggaraan PTSP Daerah yaitu terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

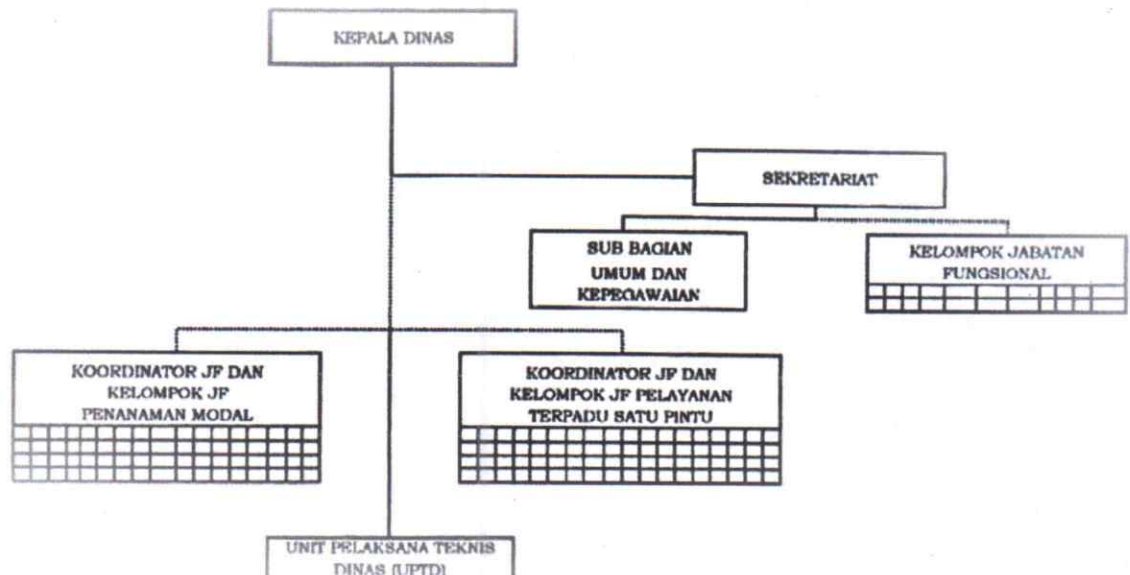
5.2 Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 95 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, di bidang penanaman modal dan pelayanan Terpadu satu pintu. Dalam rangka melaksanakan 2 (dua) program kerja dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dibentuklah sebuah Dinas dengan nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kubu Raya

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program kegiatan kerja di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
5. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas;
7. Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut tugas dan fungsi dari struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya yaitu :

1. Kepala Dinas

a. Tugas

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan menyelenggarakan kegiatan dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan sasaran strategis Dinas;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas;
3. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan sekretariat dan bidang-bidang Dinas;

4. Pengarahan pelaksanaan program kerja Dinas;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan program bidang penanaman modal dan pelayanan Terpadu satu pintu;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan pelayanan Terpadu satu pintu; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

a. Tugas

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan tugas di bidang umum dan kepegawaian.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Dinas;
2. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Dinas sesuai lingkup tugasnya;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan umum;
4. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pengendalian kegiatan di Dinas;
6. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Dinas; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi sub bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

a. Tugas

Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian.

b. Fungsi

1. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum dan kepegawaian;
3. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas umum dan kepegawaian;
4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang umum dan kepegawaian;
5. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum dan kepegawaian; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Unit Pelaksana Teknis Dinas

a. Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa kecamatan.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu;
- b. Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari koordinator kelompok jabatan fungsional dan kelompok jabatan fungsional;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB VI

PENUTUP

Sebagai penutup Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023 disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan disajikan untuk menggambarkan kecukupan penerimaan periode berjalan dalam membiayai seluruh pengeluaran, memperlihatkan kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan, menyajikan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
2. Jumlah anggaran belanja sebesar Rp. 7.084.756.934,00, terealisasi sebesar 6.956.328.207,00 (98,18%).
3. Sisa pagu anggaran belanja Rp. 128.428.727,00 atau sebesar 1,82%.

Demikian laporan keuangan ini disusun dengan penyesuaian situasi dan kondisi yang ada. Sekalipun tidak terlepas dari kendala dan permasalahan dalam proses penyusunan laporan keuangan ini, kerja keras dan koordinasi dalam mempersiapkan data yang ada membuat laporan keuangan ini dapat tersaji. Bertitik tolak dari semangat kerja tinggi dan kerjasama yang baik selama ini, diharapkan dalam penyusunan laporan keuangan selanjutnya dapat lebih lancar sehingga mampu menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang lebih berkualitas, akuntabel serta memenuhi tujuan transparansi menuju *good governance* yang dicita-citakan.

Sungai Raya, April 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kubu Raya,



AZMI, S.E., M.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007202000031006



PEMERINTAHAN KAB. KUBU RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	7.444.199.039,00	6.377.950.567,00	1.066.248.472,00	16,72
8.1	BEBAN OPERASI	6.732.923.707,00	6.023.404.984,00	709.518.723,00	11,78
8.1.01	Beban Pegawai	4.748.095.670,00	3.889.487.185,00	858.608.485,00	22,08
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.312.701.382,00	1.989.492.426,00	323.208.956,00	16,25
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	1.515.992.839,00	1.408.498.929,00	107.493.910,00	7,63
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	1.297.073.240,00	1.347.874.929,00	(50.801.689,00)	(3,77)
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	218.919.599,00	60.624.000,00	158.295.599,00	261,11
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	142.493.308,00	143.239.112,00	(745.804,00)	(0,52)
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	126.987.054,00	135.964.232,00	(8.977.178,00)	(6,60)
8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	15.506.254,00	7.274.880,00	8.231.374,00	113,15
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	90.090.000,00	108.430.000,00	(18.340.000,00)	(16,91)
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	90.090.000,00	108.430.000,00	(18.340.000,00)	(16,91)
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	105.872.040,00	86.416.000,00	19.456.040,00	22,51
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	95.972.040,00	86.416.000,00	9.556.040,00	11,06
8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	100,00
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	28.444.583,00	21.780.000,00	6.664.583,00	30,60
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	19.610.000,00	18.130.000,00	1.480.000,00	8,16
8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	8.834.583,00	3.650.000,00	5.184.583,00	142,04
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	78.829.170,00	75.606.480,00	3.222.690,00	4,26
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	67.133.340,00	71.261.280,00	(4.127.940,00)	(5,79)
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	11.695.830,00	4.345.200,00	7.350.630,00	169,17
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	198.817.367,00	6.668.781,00	192.148.586,00	2.881,31
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	198.817.367,00	6.668.781,00	192.148.586,00	2.881,31
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	20.491,00	18.706,00	1.785,00	9,54
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	14.961,00	17.606,00	(2.645,00)	(15,02)
8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	5.530,00	1.100,00	4.430,00	402,73
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	139.458.968,00	127.236.519,00	12.222.449,00	9,61
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	118.596.788,00	122.314.884,00	(3.718.096,00)	(3,04)
8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	20.862.180,00	4.921.635,00	15.940.545,00	323,89
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.170.674,00	2.899.460,00	271.214,00	9,35
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.673.136,00	2.768.510,00	(95.374,00)	(3,44)
8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	497.538,00	130.950,00	366.588,00	279,95
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	9.511.942,00	8.698.439,00	813.503,00	9,35
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	8.019.382,00	8.305.598,00	(286.216,00)	(3,45)
8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.492.560,00	392.841,00	1.099.719,00	279,94
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.435.394.288,00	1.877.794.759,00	557.599.529,00	29,69
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	811.113.479,00	622.004.945,00	189.108.534,00	30,40
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	708.330.708,00	599.074.260,00	109.256.448,00	18,24
8.1.01.02.01.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	102.782.771,00	22.930.685,00	79.852.086,00	348,23
8.1.01.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	414.567.251,00	331.269.948,00	83.297.303,00	25,14
8.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	375.706.405,00	328.212.524,00	47.493.881,00	14,47
8.1.01.02.03.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	38.860.846,00	3.057.424,00	35.803.422,00	1.171,03
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.209.713.558,00	924.519.866,00	285.193.692,00	30,85
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.055.461.501,00	890.123.834,00	165.337.667,00	18,57

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.01.02.05.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	154.252.057,00	34.396.032,00	119.856.025,00	348,46
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	22.200.000,00	(22.200.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	0,00	22.200.000,00	(22.200.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	0,00	22.200.000,00	(22.200.000,00)	(100,00)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	1.984.828.037,00	2.133.917.799,00	(149.089.762,00)	(6,99)
8.1.02.01	Beban Barang	629.974.450,00	455.020.213,00	174.954.237,00	38,45
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	629.974.450,00	455.020.213,00	174.954.237,00	38,45
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	25.220.000,00	2.550.000,00	22.670.000,00	889,02
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	1.409.300,00	(1.409.300,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.249.421,00	30.648.025,00	(8.398.604,00)	(27,40)
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	47.878.000,00	37.800.000,00	10.078.000,00	26,66
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	121.258.254,00	66.449.488,00	54.808.766,00	82,48
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.480.000,00	1.120.000,00	360.000,00	32,14
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	20.206.545,00	3.871.535,00	16.335.010,00	421,93
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.061.720,00	0,00	6.061.720,00	100,00
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	10.027.017,00	0,00	10.027.017,00	100,00
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	0,00	18.480.000,00	(18.480.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	192.994.318,00	8.381.865,00	184.612.453,00	2.202,52
8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	22.759.175,00	61.600.000,00	(38.840.825,00)	(63,05)
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	159.840.000,00	187.460.000,00	(27.620.000,00)	(14,73)
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	35.250.000,00	(35.250.000,00)	(100,00)
8.1.02.02	Beban Jasa	1.077.314.613,00	1.410.881.417,00	(333.566.804,00)	(23,64)
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	1.051.082.401,00	1.373.952.316,00	(322.869.915,00)	(23,50)
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.000.000,00	14.975.000,00	(4.975.000,00)	(33,22)
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	52.350.000,00	(52.350.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	460.000.000,00	734.758.747,00	(274.758.747,00)	(37,39)
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	11.900.000,00	150.000,00	11.750.000,00	7.833,33
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	124.200.000,00	0,00	124.200.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	0,00	17.051.000,00	(17.051.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	4.356.900,00	3.115.393,00	1.241.507,00	39,85
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	9.140.500,00	11.632.900,00	(2.492.400,00)	(21,43)
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	54.066.753,00	215.241.227,00	(161.174.474,00)	(74,88)
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	2.160.000,00	(2.160.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	308.323.248,00	308.124.049,00	199.199,00	0,06
8.1.02.02.01.0071	Beban Lembur	46.895.000,00	14.394.000,00	32.501.000,00	225,80
8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	22.200.000,00	0,00	22.200.000,00	100,00
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	24.420.212,00	35.282.101,00	(10.861.889,00)	(30,79)
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	21.990.212,00	31.845.541,00	(9.855.329,00)	(30,95)
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.080.000,00	1.527.360,00	(447.360,00)	(29,29)
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.350.000,00	1.909.200,00	(559.200,00)	(29,29)
8.1.02.02.08	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	1.812.000,00	1.647.000,00	165.000,00	10,02
8.1.02.02.08.0005	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	100,00
8.1.02.02.08.0009	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	1.647.000,00	(1.647.000,00)	(100,00)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	136.853.854,00	86.146.180,00	50.707.674,00	58,86
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	136.853.854,00	86.146.180,00	50.707.674,00	58,86
8.1.02.03.02.0022	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00	5.760.000,00	(5.760.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	79.915.654,00	52.949.180,00	26.966.474,00	50,93
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.565.200,00	863.000,00	3.702.200,00	428,99

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.03.02.0043	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	2.209.000,00	(2.209.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	21.785.000,00	3.600.000,00	18.185.000,00	505,14
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	20.318.000,00	6.059.000,00	14.259.000,00	235,34
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.270.000,00	7.850.000,00	2.420.000,00	30,83
8.1.02.03.02.0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	6.856.000,00	(6.856.000,00)	(100,00)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	140.685.120,00	181.869.989,00	(41.184.869,00)	(22,65)
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	140.685.120,00	181.869.989,00	(41.184.869,00)	(22,65)
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	110.249.394,00	37.169.377,00	73.080.017,00	196,61
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.435.726,00	144.700.612,00	(114.264.886,00)	(78,97)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	6.732.923.707,00	6.023.404.984,00	709.518.723,00	11,78
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	711.275.332,00	354.545.583,00	356.729.749,00	100,62
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	326.976.491,00	306.826.417,00	20.150.074,00	6,57
8.1.08.01.01	Beban Penyusutan Alat Besar	11.783.333,00	0,00	11.783.333,00	100,00
8.1.08.01.01.0022	Beban Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	11.783.333,00	0,00	11.783.333,00	100,00
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	44.600.000,00	0,00	44.600.000,00	100,00
8.1.08.01.02.0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	44.600.000,00	0,00	44.600.000,00	100,00
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	113.651.936,00	306.826.417,00	(193.174.481,00)	(62,96)
8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	100,00
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	17.144.632,00	306.826.417,00	(289.681.785,00)	(94,41)
8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	41.322.837,00	0,00	41.322.837,00	100,00
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	28.151.000,00	0,00	28.151.000,00	100,00
8.1.08.01.05.0010	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	582.000,00	0,00	582.000,00	100,00
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.590.000,00	0,00	5.590.000,00	100,00
8.1.08.01.05.0013	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	9.790.000,00	0,00	9.790.000,00	100,00
8.1.08.01.05.0014	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	666.667,00	0,00	666.667,00	100,00
8.1.08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	9.312.800,00	0,00	9.312.800,00	100,00
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.720.000,00	0,00	4.720.000,00	100,00
8.1.08.01.06.0001	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
8.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00	100,00
8.1.08.01.06.0004	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00
8.1.08.01.08	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	410.000,00	0,00	410.000,00	100,00
8.1.08.01.08.0092	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Measuring/Testing Device	410.000,00	0,00	410.000,00	100,00
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	151.811.222,00	0,00	151.811.222,00	100,00
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	125.481.558,00	0,00	125.481.558,00	100,00
8.1.08.01.10.0003	Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	100,00
8.1.08.01.10.0004	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	820.167,00	0,00	820.167,00	100,00
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	15.897.622,00	0,00	15.897.622,00	100,00
8.1.08.01.10.0007	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	441.875,00	0,00	441.875,00	100,00
8.1.08.01.10.0008	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.470.000,00	0,00	4.470.000,00	100,00
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	358.671.341,00	0,00	358.671.341,00	100,00
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	358.671.341,00	0,00	358.671.341,00	100,00
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	358.671.341,00	0,00	358.671.341,00	100,00
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	25.627.500,00	47.719.166,00	(22.091.666,00)	(46,30)
8.1.08.06.01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	25.627.500,00	47.719.166,00	(22.091.666,00)	(46,30)
8.1.08.06.01.0004	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	25.627.500,00	47.719.166,00	(22.091.666,00)	(46,30)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	711.275.332,00	354.545.583,00	356.729.749,00	100,62
	JUMLAH BEBAN	7.444.199.039,00	6.377.950.567,00	1.066.248.472,00	16,72
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(7.444.199.039,00)	(6.377.950.567,00)	(1.066.248.472,00)	16,72

Kab. Kubu Raya, 2 April 2026
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU
 AZMI, S.E., M.E.
 NIP. 197067202000031006





PEMERINTAH KAB. KUBU RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	824.465.151,00	(22.943.998.755,32)
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(7.444.199.039,00)	(6.377.950.567,00)
RK PPKD	6.956.328.207,00	30.147.820.932,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	17.294.099.585,00	(1.406.458,68)
Mebel	184.739.186,00	0,00
Bangunan Gedung Kantor	18.237.998.712,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(2,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(76.974.659,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(1.051.663.652,00)	0,00
EKUITAS AKHIR	17.630.693.904,00	824.465.151,00

Kab. Kubu Raya, 2 April 2026
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
AZMI, S.E., M.E.
NIP. 7007203000931006



PEMERINTAHAN KAB. KUBU RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	7.084.756.934,00	6.956.328.207,00	98,18	6.328.552.141,00
5.1	BELANJA OPERASI	6.852.933.556,00	6.733.375.707,00	98,25	6.249.702.141,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.837.647.233,00	4.748.095.670,00	98,14	4.040.979.585,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.375.840.411,00	2.312.701.382,00	97,34	1.989.492.426,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.530.853.181,00	1.515.992.839,00	98,02	1.408.498.929,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.308.372.632,00	1.297.073.240,00	99,13	1.347.874.929,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	222.480.549,00	218.919.599,00	98,39	60.624.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	143.843.928,00	142.493.308,00	99,06	143.239.112,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	128.134.612,00	126.987.054,00	99,10	135.964.232,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	15.709.316,00	15.506.254,00	98,70	7.274.880,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	93.635.625,00	90.090.000,00	96,21	108.430.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	93.635.625,00	90.090.000,00	96,21	108.430.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	118.760.582,00	105.872.040,00	89,14	86.416.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	97.697.665,00	95.972.040,00	98,23	86.416.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	21.062.917,00	9.900.000,00	47,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	28.791.458,00	28.444.583,00	98,79	21.780.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	19.795.000,00	19.610.000,00	99,06	18.130.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	8.996.458,00	8.834.583,00	98,20	3.650.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	79.607.684,00	78.829.170,00	99,02	75.606.480,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	67.739.857,00	67.133.340,00	99,10	71.261.280,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	11.867.827,00	11.695.830,00	98,55	4.345.200,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	221.326.890,00	198.817.367,00	89,82	6.668.781,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	221.326.890,00	198.817.367,00	89,82	6.668.781,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	21.607,00	20.491,00	94,83	18.706,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.387,00	14.961,00	97,23	17.606,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6.220,00	5.530,00	88,90	1.100,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	144.142.369,00	139.459.968,00	96,75	127.236.519,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	121.655.988,00	118.596.788,00	97,48	122.314.884,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	22.486.381,00	20.862.180,00	92,77	4.921.635,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.238.152,00	3.170.674,00	60,53	2.899.460,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.732.068,00	2.673.136,00	56,48	2.768.510,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	506.084,00	497.538,00	98,31	130.950,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.618.935,00	9.511.942,00	98,88	8.698.439,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.100.737,00	8.019.382,00	98,99	8.305.598,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.518.198,00	1.492.560,00	98,31	392.841,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.461.806.822,00	2.435.394.288,00	98,92	2.029.287.159,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Belan Kerja ASN	818.886.416,00	811.113.479,00	99,04	679.507.491,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Behan Kerja PNS	712.390.815,00	708.330.708,00	99,43	656.576.806,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Belan Kerja PPPK	106.505.601,00	102.782.771,00	96,50	22.930.685,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	424.296.125,00	414.567.251,00	97,70	361.618.514,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	377.826.499,00	375.706.405,00	99,43	361.591.090,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	46.469.626,00	38.860.846,00	83,62	3.057.424,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.218.614.281,00	1.209.713.558,00	99,26	985.131.154,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.061.551.652,00	1.055.461.501,00	99,42	950.735.122,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	157.062.629,00	154.252.057,00	98,21	34.396.032,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	22.200.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	22.200.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	22.200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.015.286.323,00	1.985.280.037,00	98,51	2.208.722.556,00
5.1.02.01	Belanja Barang	641.592.867,00	630.426.450,00	98,25	472.689.957,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	641.592.867,00	630.426.450,00	98,25	472.689.957,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	28.510.530,00	25.220.000,00	88,45	2.550.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Dakar dan Pelumas	701.000,00	0,00	0,00	1.409.300,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31.343.736,00	30.699.421,00	97,91	48.420.729,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	48.007.400,00	47.878.000,00	99,73	37.800.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	130.560.569,00	126.658.254,00	97,01	66.346.528,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.571.776,00	1.480.000,00	94,16	1.120.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	20.470.666,00	20.206.545,00	98,70	3.871.535,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.448.724,00	6.061.720,00	93,99	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00	18.480.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	180.001.573,00	179.606.318,00	99,78	8.381.865,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	22.930.530,00	22.759.175,00	99,25	61.600.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	160.410.000,00	159.840.000,00	99,64	187.460.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakalan Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	35.250.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.092.743.858,00	1.077.314.613,00	98,58	1.468.016.430,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.060.239.748,00	1.051.082.401,00	99,13	1.430.793.569,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.350.000,00	10.000.000,00	69,68	14.975.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	52.350.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	460.000.000,00	460.000.000,00	100,00	773.400.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	0,00	0,00	18.200.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11.900.000,00	11.900.000,00	100,00	150.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	124.200.000,00	124.200.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,00	0,00	0,00	17.051.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	4.500.000,00	4.356.900,00	96,82	3.115.393,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	12.271.500,00	9.140.500,00	74,48	11.632.900,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	55.500.000,00	54.066.753,00	97,41	215.241.227,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	308.323.248,00	308.323.248,00	100,00	308.124.049,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	46.995.000,00	46.895.000,00	99,78	14.394.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	22.200.000,00	22.200.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	30.691.800,00	24.420.212,00	79,56	35.575.861,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	24.162.000,00	21.990.212,00	91,01	31.845.541,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.566.200,00	1.080.000,00	42,08	1.657.920,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.963.600,00	1.350.000,00	34,05	2.072.400,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	1.812.310,00	1.812.000,00	99,98	1.647.000,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	1.812.310,00	1.812.000,00	99,98	0,00
5.1.02.02.15.0009	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.647.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	139.712.999,00	136.853.854,00	97,95	86.146.180,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	139.712.999,00	136.853.854,00	97,95	86.146.180,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	5.760.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perurangan	80.020.000,00	79.915.654,00	99,86	52.949.180,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.702.999,00	4.565.200,00	68,10	863.000,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.209.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	21.900.000,00	21.795.000,00	99,47	3.600.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	20.740.000,00	20.318.000,00	97,96	6.059.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.350.000,00	10.270.000,00	99,22	7.850.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	6.856.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	141.236.599,00	140.685.120,00	99,60	181.969.989,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	141.236.599,00	140.685.120,00	99,60	181.969.989,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	110.450.599,00	110.249.394,00	99,81	37.169.377,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.786.000,00	30.435.726,00	98,86	144.700.612,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	6.852.933.556,00	6.733.375.707,00	98,25	6.249.702.141,00
5.2	BELANJA MODAL	231.823.378,00	222.952.500,00	96,17	78.850.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	231.823.378,00	222.952.500,00	96,17	78.850.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	104.107.382,00	97.878.000,00	94,01	14.200.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	10.382.536,00	9.360.000,00	90,15	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	10.382.536,00	9.360.000,00	90,15	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	93.724.846,00	88.518.000,00	94,44	14.200.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	44.990.467,00	44.000.000,00	97,79	14.200.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	44.620.481,00	44.518.000,00	99,77	0,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	4.113.898,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	127.715.996,00	125.074.500,00	97,93	64.650.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	116.777.716,00	116.374.500,00	99,65	64.650.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	116.777.716,00	116.374.500,00	99,65	64.650.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.938.280,00	8.700.000,00	79,53	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	10.938.280,00	8.700.000,00	79,53	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	231.823.378,00	222.952.500,00	96,17	78.850.000,00
	JUMLAH BELANJA	7.084.756.934,00	6.956.328.207,00	98,18	6.328.552.141,00
	SURPLUS/DEFISIT	(7.084.756.934,00)	(6.956.328.207,00)	98,18	(6.328.552.141,00)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(7.084.756.934,00)	(6.328.552.141,00)	98,18	(6.328.552.141,00)





PEMERINTAHAN KAB. KUBU RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN BULAN JUNI
TAHUN ANGGARAN 2025



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN SEMESTER PERTAMA	PROGNOSIS	KETERANGAN
5.1	BELANJA OPERASI	6.852.933.556,00	3.257.228.409,00	3.595.704.147,00	3.595.704.147,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	4.837.647.233,00	2.393.928.042,00	2.443.719.191,00	2.443.719.191,00	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.375.840.411,00	1.217.336.960,00	1.158.503.551,00	1.158.503.551,00	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.530.853.181,00	780.431.279,00	750.421.902,00	750.421.902,00	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.308.372.632,00	732.437.280,00	575.935.352,00	575.935.352,00	
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	222.480.549,00	47.993.999,00	174.486.550,00	174.486.550,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	143.843.928,00	77.663.512,00	66.180.416,00	66.180.416,00	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	128.134.612,00	71.904.234,00	56.230.378,00	56.230.378,00	
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	15.709.316,00	5.759.278,00	9.950.038,00	9.950.038,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	93.635.625,00	52.740.000,00	40.895.625,00	40.895.625,00	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	93.635.625,00	52.740.000,00	40.895.625,00	40.895.625,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	118.760.582,00	68.072.040,00	50.688.542,00	50.688.542,00	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	97.697.665,00	63.572.040,00	34.125.625,00	34.125.625,00	
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	21.062.917,00	4.500.000,00	16.562.917,00	16.562.917,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	28.791.458,00	11.794.583,00	16.996.875,00	16.996.875,00	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	19.795.000,00	10.730.000,00	9.065.000,00	9.065.000,00	
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	8.996.458,00	1.064.583,00	7.931.875,00	7.931.875,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	79.607.684,00	41.460.450,00	38.147.234,00	38.147.234,00	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	67.739.857,00	38.020.500,00	29.719.357,00	29.719.357,00	
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	11.867.827,00	3.439.950,00	8.427.877,00	8.427.877,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	221.326.890,00	119.275.458,00	102.051.432,00	102.051.432,00	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	221.326.890,00	119.275.458,00	102.051.432,00	102.051.432,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	21.607,00	9.691,00	11.916,00	11.916,00	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.387,00	8.583,00	6.804,00	6.804,00	
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6.220,00	1.108,00	5.112,00	5.112,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	144.142.368,00	59.600.515,00	84.541.854,00	84.541.854,00	
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	121.655.988,00	55.920.998,00	65.734.990,00	65.734.990,00	
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	22.486.381,00	3.679.517,00	18.806.864,00	18.806.864,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.238.152,00	2.073.454,00	3.164.698,00	3.164.698,00	
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.732.068,00	1.986.154,00	2.745.914,00	2.745.914,00	
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	506.084,00	87.300,00	418.784,00	418.784,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.618.935,00	4.215.878,00	5.403.057,00	5.403.057,00	
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.100.737,00	3.953.984,00	4.146.753,00	4.146.753,00	
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.518.198,00	261.894,00	1.256.304,00	1.256.304,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.461.806.822,00	1.176.591.182,00	1.285.215.640,00	1.285.215.640,00	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	818.896.416,00	390.877.937,00	428.018.479,00	428.018.479,00	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	712.390.815,00	371.166.596,00	341.224.219,00	341.224.219,00	
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	106.505.601,00	19.711.341,00	86.794.260,00	86.794.260,00	
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	424.296.125,00	206.352.991,00	217.943.134,00	217.943.134,00	
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	377.826.499,00	195.537.678,00	182.288.821,00	182.288.821,00	
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	46.469.626,00	10.815.313,00	35.654.313,00	35.654.313,00	
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.218.614.281,00	579.360.254,00	639.254.027,00	639.254.027,00	
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.061.551.652,00	549.715.342,00	511.836.310,00	511.836.310,00	
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	157.062.629,00	29.644.912,00	127.417.717,00	127.417.717,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.015.286.323,00	863.391.367,00	1.151.984.956,00	1.151.984.956,00	
5.1.02.01	Belanja Barang	641.592.867,00	287.265.385,00	354.327.482,00	354.327.482,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Hibis	641.592.867,00	287.265.385,00	354.327.482,00	354.327.482,00	
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	28.510.530,00	25.220.000,00	3.290.530,00	3.290.530,00	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	701.800,00	0,00	701.800,00	701.800,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31.343.736,00	22.126.960,00	9.216.776,00	9.216.776,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	48.007.400,00	19.906.000,00	28.101.400,00	28.101.400,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	130.560.569,00	79.285.318,00	51.275.251,00	51.275.251,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.571.776,00	840.000,00	731.776,00	731.776,00	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Peralatan Kantor	20.470.666,00	7.843.546,00	12.627.120,00	12.627.120,00	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.448.724,00	999.000,00	5.449.724,00	5.449.724,00	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Pertengkapan Dinas	10.635.563,00	0,00	10.635.563,00	10.635.563,00	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	180.001.573,00	97.204.561,00	82.797.012,00	82.797.012,00	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	22.930.530,00	0,00	22.930.530,00	22.930.530,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN SEMESTER PERTAMA	PROGNOSIS	KETERANGAN
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.092.743.858,00	489.964.502,00	602.779.356,00	602.779.356,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.060.239.748,00	477.176.902,00	583.062.846,00	583.062.846,00	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.350.000,00	0,00	14.350.000,00	14.350.000,00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	460.000.000,00	246.000.000,00	214.000.000,00	214.000.000,00	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	124.200.000,00	55.586.682,00	68.613.318,00	68.613.318,00	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	4.500.000,00	2.180.700,00	2.319.300,00	2.319.300,00	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	12.271.500,00	6.271.500,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	55.500.000,00	0,00	55.500.000,00	55.500.000,00	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	308.323.248,00	128.488.020,00	179.855.228,00	179.855.228,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	46.995.000,00	17.520.000,00	29.475.000,00	29.475.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawab dan Pengelola Keuangan	22.200.000,00	9.250.000,00	12.950.000,00	12.950.000,00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	30.691.800,00	12.787.600,00	17.904.200,00	17.904.200,00	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	24.162.000,00	11.513.200,00	12.648.800,00	12.648.800,00	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.566.200,00	566.400,00	1.999.800,00	1.999.800,00	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.963.600,00	708.000,00	3.255.600,00	3.255.600,00	
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	1.812.310,00	0,00	1.812.310,00	1.812.310,00	
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	1.812.310,00	0,00	1.812.310,00	1.812.310,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	139.712.999,00	63.500.754,00	76.212.245,00	76.212.245,00	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	139.712.999,00	63.500.754,00	76.212.245,00	76.212.245,00	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	80.020.000,00	37.343.654,00	42.676.346,00	42.676.346,00	
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.702.999,00	3.309.100,00	3.390.899,00	3.390.899,00	
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	21.900.000,00	9.400.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	20.740.000,00	8.568.000,00	12.172.000,00	12.172.000,00	
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.350.000,00	4.796.000,00	5.554.000,00	5.554.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	141.236.599,00	22.570.726,00	118.665.873,00	118.665.873,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	141.236.599,00	22.570.726,00	118.665.873,00	118.665.873,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Diusia	110.450.599,00	0.350.000,00	102.100.599,00	102.100.599,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.786.000,00	14.220.726,00	16.565.274,00	16.565.274,00	
	JUMLAH BELANJA OPERASI	6.852.933.556,00	3.257.229.408,00	3.595.704.147,00	3.595.704.147,00	
5.2	BELANJA MODAL	231.823.378,00	39.060.000,00	192.763.378,00	192.763.378,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	231.823.378,00	39.060.000,00	192.763.378,00	192.763.378,00	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	104.107.382,00	9.360.000,00	94.747.382,00	94.747.382,00	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	10.382.536,00	9.360.000,00	1.022.536,00	1.022.536,00	
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	10.382.536,00	9.360.000,00	1.022.536,00	1.022.536,00	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	93.724.846,00	0,00	93.724.846,00	93.724.846,00	
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	44.990.467,00	0,00	44.990.467,00	44.990.467,00	
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	44.620.481,00	0,00	44.620.481,00	44.620.481,00	
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	4.113.898,00	0,00	4.113.898,00	4.113.898,00	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	127.715.996,00	29.700.000,00	98.015.996,00	98.015.996,00	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	116.777.716,00	21.000.000,00	95.777.716,00	95.777.716,00	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	116.777.716,00	21.000.000,00	95.777.716,00	95.777.716,00	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.938.280,00	8.700.000,00	2.238.280,00	2.238.280,00	
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	10.938.280,00	8.700.000,00	2.238.280,00	2.238.280,00	
	JUMLAH BELANJA MODAL	231.823.378,00	39.060.000,00	192.763.378,00	192.763.378,00	

Kab. Kunduraya, 2 April 2026
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SAATU PINTU

AZMI, S.E., M.E.
 NRP.19700720000031006



PEMERINTAHAN KAB. KUBU RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	17.630.693.904,00	824.465.151,00
1.1	ASET LANCAR	9.028.000,00	588.000,00
1.1.12	Persediaan	9.028.000,00	588.000,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	9.028.000,00	588.000,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	9.028.000,00	588.000,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	9.028.000,00	588.000,00
	JUMLAH ASET LANCAR	9.028.000,00	588.000,00
1.3	ASET TETAP	17.581.932.987,00	758.516.734,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	3.694.084.891,00	3.294.381.205,00
1.3.02.01	Alat Besar	141.400.000,00	141.400.000,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	141.400.000,00	141.400.000,00
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	141.400.000,00	141.400.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	685.800.000,00	685.800.000,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	685.800.000,00	685.800.000,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	547.700.000,00	547.700.000,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	138.100.000,00	138.100.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	21.250.000,00	21.250.000,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	21.250.000,00	21.250.000,00
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	12.000.000,00	12.000.000,00
1.3.02.03.03.0009	Alat Ukur Lain-Lain	9.250.000,00	9.250.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.191.290.436,00	922.061.250,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	332.098.000,00	291.608.000,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	1.450.000,00	1.450.000,00
1.3.02.05.01.0003	Alat Reproduksi (Penggandaan)	29.200.000,00	29.200.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	157.959.000,00	148.599.000,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	143.489.000,00	112.359.000,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	623.827.436,00	395.088.250,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	270.795.686,00	86.056.500,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	4.700.000,00	4.700.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	259.965.750,00	215.965.750,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	7.610.000,00	7.610.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	79.669.000,00	79.669.000,00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	1.087.000,00	1.087.000,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	235.365.000,00	235.365.000,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	72.250.000,00	72.250.000,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	4.000.000,00	4.000.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	67.415.000,00	67.415.000,00
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	5.000.000,00	5.000.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Aisip Pejabat	86.700.000,00	86.700.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	119.475.000,00	119.475.000,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	93.725.000,00	93.725.000,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	50.175.000,00	50.175.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	41.100.000,00	41.100.000,00
1.3.02.06.01.0004	Peralatan Cetak	2.450.000,00	2.450.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	25.750.000,00	25.750.000,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	25.750.000,00	25.750.000,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.765.000,00	2.765.000,00
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	2.765.000,00	2.765.000,00
1.3.02.07.01.0012	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	2.765.000,00	2.765.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	4.100.000,00	4.100.000,00
1.3.02.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	4.100.000,00	4.100.000,00
1.3.02.08.04.0005	System/Power Supply	4.100.000,00	4.100.000,00
1.3.02.09	Alat Persenjataan	56.225.000,00	56.225.000,00
1.3.02.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	22.400.000,00	22.400.000,00
1.3.02.09.02.0001	Alat Keamanan	22.400.000,00	22.400.000,00
1.3.02.09.04	Alat Khusus Kepolisian	33.825.000,00	33.825.000,00
1.3.02.09.04.0002	Alat Dalmas/Alat Dakhura	33.825.000,00	33.825.000,00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.02.10	Komputer	1.471.779.455,00	1.341.304.955,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	1.085.548.806,00	969.174.306,00
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	19.840.000,00	19.840.000,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	1.042.208.806,00	925.834.306,00
1.3.02.10.01.0003	Komputer Unit Lainnya	23.500.000,00	23.500.000,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	386.230.649,00	372.130.649,00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	4.921.000,00	4.921.000,00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	822.000,00	822.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	221.228.277,00	207.128.277,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	136.909.372,00	136.909.372,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	22.350.000,00	22.350.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	18.237.998.712,00	0,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	18.237.998.712,00	0,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	18.237.998.712,00	0,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	18.237.998.712,00	0,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	9.500.000,00	9.500.000,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	9.500.000,00	9.500.000,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	9.500.000,00	9.500.000,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	9.500.000,00	9.500.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(4.359.650.616,00)	(2.545.364.471,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.949.315.623,00)	(2.545.364.471,00)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(141.400.000,00)	0,00
1.3.07.01.01.0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(141.400.000,00)	0,00
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(540.850.000,00)	0,00
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(402.750.000,00)	0,00
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(138.100.000,00)	0,00
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(21.250.000,00)	0,00
1.3.07.01.03.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(12.000.000,00)	0,00
1.3.07.01.03.0044	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	(9.250.000,00)	0,00
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(909.463.049,00)	(2.545.364.471,00)
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(1.450.000,00)	0,00
1.3.07.01.05.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	(29.200.000,00)	0,00
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(149.691.000,00)	0,00
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(89.274.034,00)	(2.545.364.471,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(199.978.996,00)	0,00
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(4.700.000,00)	0,00
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(161.896.917,00)	0,00
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(6.785.500,00)	0,00
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(71.660.667,00)	0,00
1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(1.087.000,00)	0,00
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(50.396.667,00)	0,00
1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(4.000.000,00)	0,00
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(47.642.267,00)	0,00
1.3.07.01.05.0018	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	(5.000.000,00)	0,00
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(86.700.000,00)	0,00
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(107.999.166,00)	0,00
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(49.075.000,00)	0,00
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(32.112.500,00)	0,00
1.3.07.01.06.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	(1.061.666,00)	0,00
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(25.750.000,00)	0,00
1.3.07.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(2.765.000,00)	0,00
1.3.07.01.07.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	(2.765.000,00)	0,00
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(888.333,00)	0,00
1.3.07.01.08.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply	(888.333,00)	0,00
1.3.07.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(56.225.000,00)	0,00
1.3.07.01.09.0011	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan	(22.400.000,00)	0,00
1.3.07.01.09.0019	Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alat Dalmas/Alat Dakhura	(33.825.000,00)	0,00
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(1.168.475.076,00)	0,00
1.3.07.01.10.0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(19.840.000,00)	0,00
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(785.601.038,00)	0,00
1.3.07.01.10.0003	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	(10.183.333,00)	0,00
1.3.07.01.10.0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	(4.921.000,00)	0,00
1.3.07.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(822.000,00)	0,00
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Lainnya		

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(135.956.154,00)	0,00
1.3.07.01.10.0008	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	(9.685.000,00)	0,00
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.410.334.993,00)	0,00
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(1.410.334.993,00)	0,00
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(1.410.334.993,00)	0,00
	JUMLAH ASET TETAP	17.581.932.987,00	758.516.734,00
1.5	ASET LAINNYA	39.732.917,00	65.360.417,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	152.010.000,00	701.692.000,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	152.010.000,00	701.692.000,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	152.010.000,00	701.692.000,00
1.5.03.01.01.0005	Software	152.010.000,00	701.692.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	949.762.525,00	400.080.525,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	949.762.525,00	400.080.525,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	949.762.525,00	400.080.525,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	400.080.525,00	400.080.525,00
1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	549.682.000,00	0,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(113.047.083,00)	(637.101.583,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(113.047.083,00)	(637.101.583,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(113.047.083,00)	(637.101.583,00)
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(113.047.083,00)	(637.101.583,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(948.992.525,00)	(399.310.525,00)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(948.992.525,00)	(399.310.525,00)
1.5.06.01.01	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	235.928.310,00
1.5.06.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	0,00	235.928.310,00
1.5.06.01.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(948.992.525,00)	(635.238.835,00)
1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(399.310.525,00)	(635.238.835,00)
1.5.06.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(549.682.000,00)	0,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	39.732.917,00	65.360.417,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	17.630.693.904,00	824.465.151,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
3	EKUITAS	17.630.693.904,00	824.465.151,00
3.1	EKUITAS	17.630.693.904,00	824.465.151,00
3.1.01	Ekuitas	10.674.365.697,00	(29.323.355.781,00)
3.1.01.01	Ekuitas	18.118.564.736,00	(22.945.405.214,00)
3.1.01.01.01	Ekuitas	18.118.564.736,00	(22.945.405.214,00)
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	18.118.564.736,00	(22.945.405.214,00)
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(7.444.199.039,00)	(6.377.950.567,00)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(7.444.199.039,00)	(6.377.950.567,00)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(7.444.199.039,00)	(6.377.950.567,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	6.956.328.207,00	30.147.820.932,00
3.1.03.01	RK PPKD	6.956.328.207,00	30.147.820.932,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	6.956.328.207,00	30.147.820.932,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	6.956.328.207,00	30.147.820.932,00
	JUMLAH EKUITAS	17.630.693.904,00	824.465.151,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	17.630.693.904,00	824.465.151,00

Kab. Kubu Raya, 2 April 2026
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERRABU SATU PINTU

AZMI, S.E., M.E.
NIP.197007202600031006